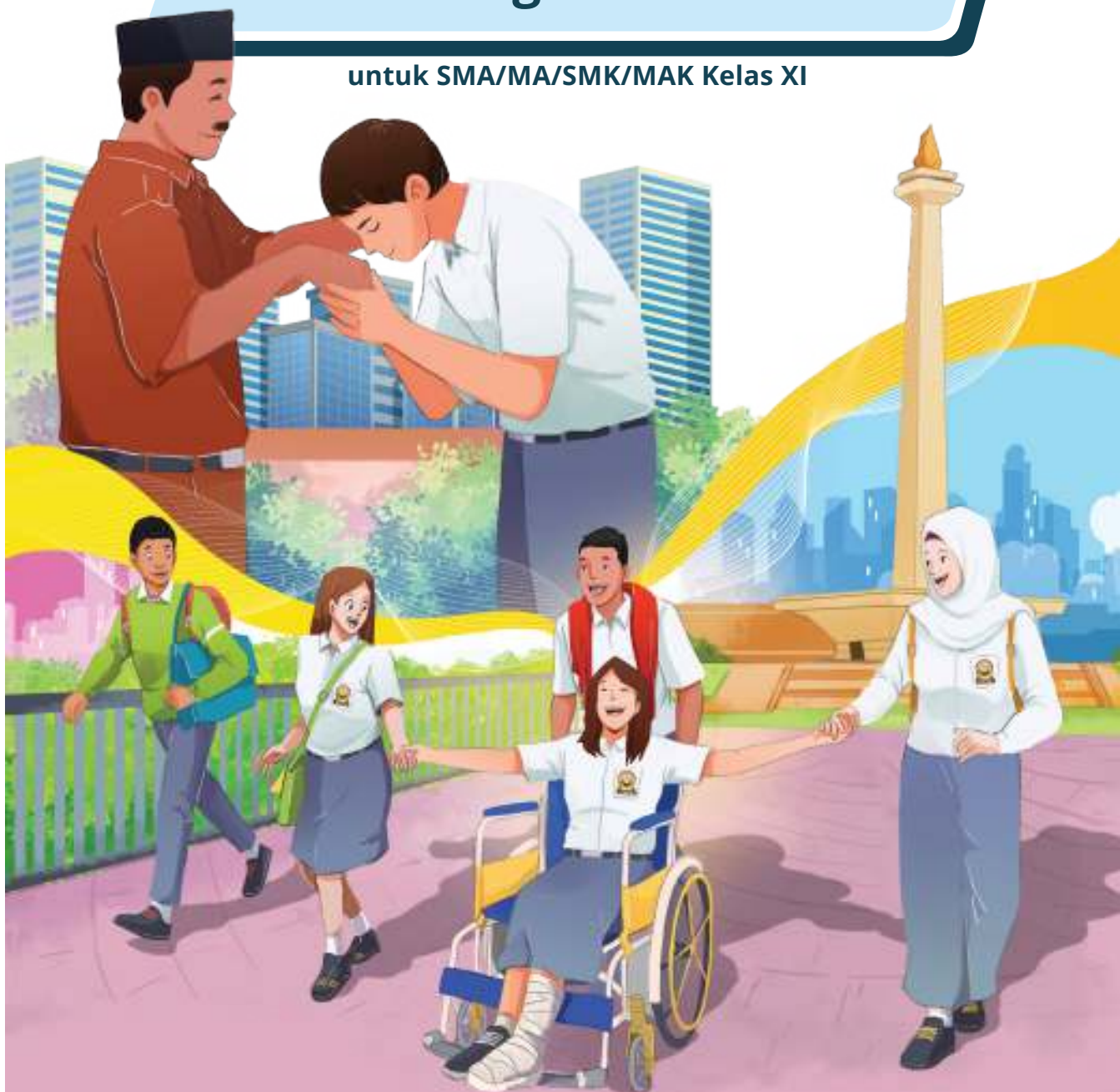




Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila

untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI



Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2022

Penafian: Buku ini merupakan buku referensi (rujukan) yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penyusunan buku ini mengacu pada Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Standar Materi yang ditetapkan oleh BPIP. Oleh karena itu, buku ini dapat digunakan sebagai pengayaan pengetahuan tentang ideologi Pancasila di program pendidikan dan satuan pendidikan. Buku ini juga merupakan dokumen dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI

Penulis

Hasse Jubba
Yuyus Kardiman
Prayogo

Penelaah

Muhammad Sabri, Adji Samekto, Dadang Sundawa, Dwi Purwoko

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno, Irene Camelyn Sinaga

Kontributor

Satriwan Salim, Wahyuni

Ilustrator

M. Raafi'u Firmansyah, Eka Apriliawan, Mokhammad Khotibul Umam

Editor

Hendrikus Genggor

Desainer

Muhammad Nurjihad, Dhani Damara, Imee Amiatun

Penerbit

Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jalan Veteran III No. 2, RT 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Cetakan Pertama, 2022

ISBN 978-623-8113-09-5 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-623-8113-11-8 (jil.2)

Isi buku ini menggunakan huruf Opens Sans 11/16 pt., Steve Matteson
xiv, 146 hlm.: 17,6 × 25 cm.



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN

Salam Pancasila!

Buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan buku referensi utama dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK. Buku referensi ini mengacu pada buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP). Hadirnya buku bahan ajar berawal dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, proses penyusunan buku bahan ajar PPIP melibatkan sejumlah pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila. Pada bulan Agustus 2021, buku bahan ajar PPIP selesai disusun oleh BPIP. Bertepatan dengan Perayaan Hari Lahir Pancasila di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 1 Juni 2022, buku bahan ajar Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila diluncurkan sekaligus menandai dicanangkannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan formal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam perkembangannya, buku bahan ajar tersebut belum dapat langsung dipergunakan dalam satuan pendidikan karena harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menjadi arus utama dalam pendidikan Indonesia saat ini. Untuk itu, dilakukan pendalaman kembali oleh BPIP bersama Kemendikbudristek dengan melibatkan unsur pakar dan praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila serta Anggota Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pakar BPIP. Sebagai hasilnya, buku bahan ajar yang telah diselaraskan ini ditetapkan menjadi buku referensi utama Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penulisan buku referensi ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Pemberian metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada siswa (*student centered learning*) dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar. Cara penyampaian materi yang ada pada buku mendorong agar para peserta didik bisa mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun dalam memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Buku referensi PPIP ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai *stakeholder* terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa sejatinya pembinaan Ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama secara bergotong royong demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik dengan pengamalan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Kepada semua pihak yang telah bergotong royong dengan tekun sedari awal menyusun buku bahan ajar dan buku referensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada seluruh satuan pendidikan formal jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MAK ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dalam upaya untuk membumikan Pancasila kembali melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rida dan karunia-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 12 Desember 2022

Kepala,



Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberhasilan bangsa kita untuk melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga dengan dirumuskannya suatu falsafah yang sarat makna, yakni Pancasila. Sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bertanah air, Pancasila mewakili nilai-nilai luhur yang senantiasa kita junjung sebagai masyarakat Indonesia, sekaligus menggambarkan mimpi dan harapan kita dalam membangun negara yang maju dan bermartabat.

Mengingat pentingnya makna dan peran Pancasila, kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkomitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan karakter pelajar Indonesia.

Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka, kami mendorong Pendidikan Pancasila yang jauh lebih relevan dan kontekstual sehingga anak-anak Indonesia dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Hadirnya buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* yang lahir berkat kerja sama Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan langkah lanjutan dalam upaya kita bersama

mewujudkan Pelajar Pancasila. Buku referensi ini memuat materi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang Pancasilais.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga buku ini dapat terbit dan menjadi referensi bagi kita semua dalam melahirkan Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Besar harapan saya bahwa buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* ini dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.

Mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar, membawa Indonesia melompat ke masa depan dalam semangat Pancasila.

Jakarta, Januari 2023



**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,**

Nadiem Anwar Makarim

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Buku ini pada dasarnya merupakan dorongan atau stimulus pembelajaran bagi para peserta didik. Dengan itu, guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan contoh-contoh yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi setempat agar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Agar mudah dimengerti, buku Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI ini disusun secara sistematis ke dalam lima (5) bab. Dalam setiap babnya, buku ini memiliki bagian-bagian, yaitu:



Capaian Kompetensi

Pada setiap bagian awal bab buku ini, disajikan keterangan mengenai capaian kompetensi peserta didik setelah mempelajari dan melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya.



Pengantar

Bagian ketiga adalah bagian pengantar. Pada bagian ini, peserta didik akan diantar memasuki pelajaran pada bab melalui narasi singkat yang mengurai latar belakang dan tujuan berbagai materi pembelajaran serta aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya.



Praktik Pengamalan Pancasila

Bagian keempat adalah praktik pengamalan Pancasila. Di bagian ini, peserta didik akan dikenalkan pada praktik-praktik pengamalan Pancasila

yang terjadi di tengah kehidupan. Hal ini penting untuk memberikan contoh teladan kepada peserta didik bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.



Materi Pokok

Bagian kelima adalah Materi Pokok. Bagian ini berisi pemaparan tentang konsep-konsep terkait Pancasila yang tengah dipelajari pada bab. Penyampaian narasi tulisan dan ilustrasi gambar pada bagian ini akan disampaikan secara menarik guna memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya.



Refleksi

Bagian keenam adalah refleksi. Refleksi dalam buku ini disampaikan dalam bentuk beragam. Ada yang berupa soal pengingat, diskusi, hingga aktivitas yang mengajak peserta didik melakukan hal-hal yang membuat mereka mampu merefleksi berbagai pengalaman belajar yang telah diterima.

Buku ini juga memiliki glosarium yang berisi daftar istilah-istilah penting yang terdapat dalam buku dengan penjelasan arti istilah dan diurutkan secara alfabetis. Kalian jangan lupa untuk bertanya kepada guru dan berdiskusi dengan teman apabila ada pelajaran, kegiatan, dan evaluasi di dalam buku ini yang kurang dimengerti.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I GOTONG ROYONG DALAM PANCASILA.....	1
BAB II IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG DALAM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA	25
BAB III HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA.....	47
BAB IV TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA.....	81
BAB V PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PANCASILA.....	95
GLOSARIUM	128
DAFTAR PUSTAKA	132
PROFIL PELAKU PENERBITAN	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pidato Sukarno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945.....	5
Gambar 1.2	Toleransi antar umat beragama.	7
Gambar 1.3	Seorang Pria memberikan duduk kepada Ibu dengan anaknya di Kereta sebagai contoh adab dalam kehidupan.	8
Gambar 1.4	Potret pengabdian pengajar muda indonesia dalam memberikan akses terhadap hak pendidikan bagi anak-anak di tanah Papua.....	11
Gambar 1.6	Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi cerminan persatuan bangsa.	12
Gambar 1.5	Bersama dalam keberagaman.	12
Gambar 1.7	Musyawarah mufakat.....	13
Gambar 1.8	DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mencapai mufakat dengan cara musyawarah.	15
Gambar 1.9	Aksi sosial warga.	16
Gambar 1.10	Daftar Negara Paling Dermawan di Dunia Tahun 2021	17
Gambar 1.11	Potret tradisi Ngayah di Bali.	18
Gambar 1.12	Potret tradisi Marsialapari di Sumatra Utara.....	19
Gambar 1.13	Potret tradisi Marakka' Bola pada masyarakat Bugis.	20
Gambar 2.1	Potret pengembangan Koperasi Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta	28
Gambar 2.2	Potensi Produk UMKM	29
Gambar 2.3	Cuplikan berita 100 koperasi besar di Indonesia tahun 2021	30

Gambar 2.4	Pabrik pengolahan susu milik Koperasi Fonterra, Selandia Baru.....	32
Gambar 2.5	Salah satu toko ritel milik Koperasi NTUC FairPrice, Singapura.	33
Gambar 2.6	Program pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai bagian agenda pembangunan (Prioritas Nasional) 1 dalam RPJMN 2020-2024.....	41
Gambar 2.7	Infografik Program	44
Gambar 3.1	Pelaksanaan Musrenbangnas 2021 dalam rangka strategi bangkitnya Indonesia dari pandemi covid-19	50
Gambar 3.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes).....	51
Gambar 3.3	Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui penguasaan ilmu dan teknologi.....	53
Gambar 3.4	Ilustrasi Kemajuan Teknologi.	55
Gambar 3.5	Ilustrasi seseorang membantu nenek yang sedang menyeberang.....	58
Gambar 3.6	Ilustrasi Pasukan Penanganan Terorisme Indonesia..	61
Gambar 3.7	Ilustrasi penguatan usaha rakyat melalui pasar tradisional.....	63
Gambar 3.8	Ilustrasi penguatan usaha rakyat melalui pasar tradisional.....	65
Gambar 3.9	Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.....	67
Gambar 3.10	Ilustrasi produksi petani di pedesaan.....	70
Gambar 3.11	Ilustrasi ketersediaan bahan bakar sebagai upaya pembangunan di bidang transportasi.	72
Gambar 3.12	Jalan penghubung satu daerah dengan daerah lainnya.	73
Gambar 3.13	Ilustrasi aktivitas di bandara.....	74

Gambar 3.14	Ilustrasi aktivitas di pelabuhan.	75
Gambar 3.15	Ilustrasi aktivitas di bandara.....	77
Gambar 4.1	Ilustrasi kerukunan umat beragama.....	86
Gambar 4.2	Saling tolong menolong.....	88
Gambar 4.3	<i>Stop hoax</i>	89
Gambar 4.4	<i>Stop money politic</i>	91
Gambar 4.5	Potret ketimpangan ekonomi masyarakat perkotaan.	92
Gambar 5.1	Infografik tiga misi utama pembangunan berkelanjutan.....	99
Gambar 5.2	Potret keseharian masyarakat Kajang.	100
Gambar 5.3	Foto Pertemuan Konferensi Bumi PBB atau United Nations' Earth Summit	108
Gambar 5.4	Infografik tiga aspek Pembangunan Berkelanjutan....	109
Gambar 5.5	Infografik Delapan Poin Millennium Development Goals	110
Gambar 5.6	Infografik 5 poin perubahan mendasar dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan.....	114
Gambar 5.7	Infografik 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ...	118
Gambar 5.8	Potret pembangunan infrastruktur jalan di daerah 3T.	120
Gambar 5.9	Gerakan peduli lingkungan.....	124



BAB I

GOTONG ROYONG DALAM PANCASILA



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab I kalian diharapkan mampu:

1. menjelaskan dengan tepat makna gotong royong di dalam Pancasila berdasarkan Pidato Sukarno 1 Juni 1945 dan pemikiran Mohammad Hatta;
2. mengaitkan hubungan antara gotong royong dengan sila-sila Pancasila secara utuh;
3. mengenali nilai-nilai gotong royong dalam tradisi kehidupan masyarakat Indonesia melalui beberapa contoh keteladanan yang disajikan;
4. mengembangkan sikap dan perilaku gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.



Pengantar

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup memiliki inti nilai yang disebut dengan gotong royong. Inti nilai ini terdapat dalam sila-sila Pancasila dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat kita. Selain dipraktikkan oleh masyarakat, visi gotong royong juga termuat dalam bangunan sistem kenegaraan dan kebijakan pembangunan. Bagaimanakah kita bisa memahami hal itu? Yuk, kita pelajari bersama-sama.

Mengapa gotong royong penting dalam Pancasila dan bagaimana mempraktikkan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Untuk bisa menjawab hal ini, kita perlu memahami terlebih dahulu cara kita dalam memahami Pancasila.

Pancasila berisi lima sila yaitu sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila merupakan sistem nilai di mana keberadaannya bukan hanya sebuah konsep dan filosofis, tetapi merupakan rangkaian nilai kehidupan yang nyata hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pandangan dan pedoman hidup yang oleh Sukarno sebut *Weltanschauung*.

Hatta dalam Pengertian Pancasila (1977) menyatakan bahwa sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri dan saling terpisah melainkan membentuk satu kesatuan nilai yang saling terkait. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia

untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Dasar kemanusiaan adalah kelanjutannya sebagai dasar perbuatan yang baik di dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu dan tidak terbagi-bagi, berdasarkan pada ideologi sendiri. Dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan adil yang mencerminkan kemauan rakyat, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan sekaligus tujuan (Hatta;1977).

Hubungan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila Persatuan Indonesia (kebangsaan) juga seperti itu. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip Ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk upaya merawat persatuan di tengah keragaman bangsa Indonesia. Oleh karena inti kebangsaan adalah persatuan nasional, maka menjaga keutuhan bangsa dilakukan dengan cara menjaga persatuan. Dalam kaitan inilah ajaran Ketuhanan di semua agama menyerukan pentingnya persatuan. Artinya, ketika kita membangun persatuan bangsa, sama dengan melaksanakan perintah Tuhan.

Sila Persatuan dan sila Kerakyatan juga memiliki hubungan yang melahirkan prinsip kebangsaan, dipraktikkan melalui keterlibatan kita dalam demokrasi. Artinya, nasionalisme kita tidak bersifat pasif, melainkan aktif, yakni menjadi pelajar yang terlibat dalam praktik demokrasi. Praktik demokrasi tidak hanya terjadi pada momen pemilihan umum, tetapi juga dalam berbagai keterlibatan untuk membangun bangsa secara umum, dan dimulai dari sekolah. Misalnya memilih ketua kelas atau ketua OSIS tidak berdasarkan kesamaan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), tetapi karena kemampuan dan integritas dari calon pemimpin. Hubungan sila Persatuan dan Kerakyatan mengharuskan kita menjadi pelajar atau warga negara yang aktif untuk terus memajukan bangsa.

Hubungan antarsila bersifat sistemik hirarkis, di mana setiap sila merupakan satu sistem yang saling berkaitan, tidak berdiri sendiri, dan saling mendasari dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa

menjadi dasar bagi semua sila. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai atau menjadi roh bagi sila-sila lainnya.

Implementasi dari hubungan antarsila dapat dilihat secara sederhana dari cerita berikut; sila pertama, Pak Rudi adalah seorang yang dikenal taat beribadah di lingkungan rumahnya. Di waktu-waktu tertentu beliau tampak beribadah dan berdoa dengan khusyuk di tempat ibadahnya.

Sila kedua, para tetangga sangat menyenangkannya karena Pak Rudi begitu santun, toleran, menghargai dan menghormati keberadaan orang lain yang berada di lingkungan rumahnya. Sila ketiga, Pak Rudi selalu menjadi orang yang pertama jika dibutuhkan oleh tetangganya untuk kepentingan bersama, selalu berpikir dan bertindak untuk kepentingan bersama. Bagi beliau kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih penting daripada kepentingannya secara individu. Tidak heran Pak Rudi dipercaya oleh warga sekitar menjadi ketua RW (Rukun Warga).

Sila keempat, Pak Rudi sangat bertanggung jawab dalam posisinya sebagai ketua RW. Tentu hal tersebut tidak mengherankan karena ketika menjadi warga biasa pun beliau memang dikenal sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Setiap ada masalah yang berkaitan dengan warga dan kepentingan umum, Pak Rudi selalu melibatkan banyak orang untuk mendiskusikannya, sehingga warga merasa dilibatkan dalam seluruh kegiatan dan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Dalam kepemimpinan Pak Rudi, tercipta budaya masyarakat untuk bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Sila kelima, hadirnya sosok Pak Rudi, menjadikan masyarakat di lingkungan rumahnya peduli terhadap sesama, saling berbagi dalam kebaikan, bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Pak Rudi menjadi sosok yang menginspirasi bagi banyak orang untuk selalu menjadikan nilai-nilai Ketuhanan YME sebagai jiwa dan fondasi dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial.



Praktik Pengalaman Pancasila



Gambar 1.1 Pidato Sukarno dalam Sidang BPUPKI 1 Juni 1945

Sumber: ANRI, *Khazanah arsip foto Indonesian Press Photo Services (IPPHOS)*, 2021

Gotong royong bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejak dahulu gotong royong telah tertanam dan menjadi wujud perilaku dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan.

Beberapa daerah memiliki istilah yang berbeda untuk menggambarkan perilaku gotong royong. Contoh, *Ngayah* (Bali) yakni bekerja sama sukarela untuk membantu tetangga maupun orang lain seperti membantu tetangga kesulitan, kegiatan ibadah dan lain-lain. Contoh lain, *sambatan* (Gunung Kidul, Yogyakarta) yakni gotong royong masyarakat Yogyakarta dalam membantu sesama untuk membangun rumah, hajatan, panen

dan lain-lain. *Masohi* (Maluku) yakni sikap tolong-menolong dan saling membantu masyarakat Maluku untuk tujuan tertentu. *Gemohing* (NTT) yakni gotong royong warga Nusa Tenggara Timur dalam membantu warga tetangga kampung secara sukarela, seperti membantu membangun rumah, memanen, menanam ladang dan lain-lain. *Liliuran* (Sukabumi, Jawa Barat) yakni gotong royong saling membantu warga Sukabumi dalam mengelola lahan hingga panen.

Hampir dalam bentuk kegiatan yang sama, di beberapa daerah lain juga memiliki sebutan yang berbeda tentang gotong royong seperti *Mapalus* (Minahasa), *Alang Tulung* (Aceh) *Ammosi* (Sulawesi Tengah), *Ngacau Gelamai* (Bengkulu), *Alak Tau* (Dayak Rindang Benua), *Marsialapari* (Sumatera Utara), *Nugal* (Kalimantan Barat), *Song Osong Lombhung* (Madura), *Mappalette Bola* (Sulawesi Selatan), *nyambungan-nyambungan* (Suku Baduy), *Kuriak* (Subang), *Sabilulungan* (Sunda, Jawa Barat), *Batobo* (Riau), *Helem Foi Kenambai Umbai* (Papua), dan lain-lain.



Materi Pokok

A. Pentingnya Gotong Royong

Seberapa pentingnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Secara kodrati, manusia memiliki dua peran. Pertama sebagai makhluk individu, artinya setiap manusia sebagai makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa berhak untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadinya termasuk berhubungan dengan Tuhan. Kedua, sebagai makhluk sosial, di mana manusia secara kodrati tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia membutuhkan keberadaan orang lain dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Seorang pemikir Yunani kuno, Aristoteles menyebutnya *Zoon Politicon*, yang berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat.

Di lain pihak keberadaan manusia juga secara kodrati berbeda antara yang satu dengan yang lainnya baik fisik maupun psikis. Perbedaan itu kemudian berkembang menjadi perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, setiap manusia dituntut untuk memiliki keterampilan hidup dalam perbedaan. Keterampilan hidup inilah yang disebut dengan Gotong Royong.

Gotong royong merupakan wujud perilaku manusia Indonesia sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini adalah penjelasan penting bagaimana setiap sila dalam Pancasila menjadi landasan ideal terhadap wujud perilaku gotong royong.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya atau beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wujud perilaku dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah toleransi, yakni perilaku mengakui, menghormati dan menghargai orang lain dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Toleransi dapat dilakukan antarumat seagama dan antarumat beragama. Sikap toleransi inilah yang menjadi dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan gotong royong. Sehingga perilaku gotong royong tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak ada sikap toleransi.



Gambar 1.2 Toleransi antar umat beragama.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dasar ini menurut Mohammad Hatta merupakan kelanjutan dalam praktik hidup dari Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kedudukannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sila ini memberikan pesan kepada setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa menjadi manusia yang mampu bersikap adil baik untuk dirinya maupun orang lain dan menjadi manusia yang beradab. Bersikap adil artinya sikap seseorang yang mampu menempatkan diri pada tempatnya, atau bersikap objektif dan tidak berat sebelah. Dasar bagi seseorang agar mampu bersikap adil adalah dengan mentaati setiap aturan atau norma yang berlaku. Ada beberapa jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, antara lain; norma hukum, norma susila, norma kesopanan, norma adat dan norma agama. Beradab artinya kemampuan seseorang untuk mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan orang lain yang berbeda sebagai sebuah kodrat alam yang Tuhan Yang Maha Kuasa ciptakan.



Gambar 1.3 Seorang Pria memberikan duduk kepada Ibu dengan anaknya di Kereta sebagai contoh adab dalam kehidupan.

Dari penjelasan di atas, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan pesan penghormatan terhadap sesama manusia dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu secara otomatis, sila Kemanusiaan memuat gotong royong. Mengapa? Karena sila kedua ini memerintahkan kita untuk menghormati orang lain sebagai manusia yang bermartabat. Pada sila Kemanusiaan tidak terdapat sentimen kelompok berdasarkan perbedaan suku, agama, ras maupun antargolongan yang membuat kita membedakan orang. Sila Kemanusiaan mengajarkan pada kita bahwa setiap orang adalah manusia, sehingga mereka harus dihormati karena statusnya sebagai manusia.

Persamaan martabat sebagai manusia membuat kita dapat bergotong royong. Tanpa kesadaran akan persamaan sebagai sesama manusia yang harus dihormati, kita tidak akan bisa bersatu dalam kebersamaan, tidak bisa kerja bersama demi kebahagiaan bersama.

Selain memuat penghormatan terhadap martabat manusia, sila Kemanusiaan juga menjadi payung bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Jika mengacu pada rancangan UUD oleh para pendiri bangsa (pra-amandemen), maka hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD mencakup tiga generasi hak asasi manusia. Tiga generasi HAM tersebut, meliputi:

1. Generasi Pertama: Hak Sipil dan Hak Politik

Generasi pertama hak asasi manusia adalah hak sipil yang menyangkut kebebasan warga negara untuk mengembangkan diri dan terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi pertama hak asasi manusia ini memuat hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berorganisasi, hak beragama, hak untuk diproses secara hukum dengan seadil-adilnya, dan hak turut serta dalam pengambilan keputusan bersama (*voting rights*). Dalam UUD NRI 1945, hak ini antara lain terkandung dalam Pasal 27 (ayat 1), Pasal 28, dan Pasal 29.

2. **Generasi Kedua: Hak Demokratis**

Generasi kedua hak asasi manusia terkait dengan proses negara dalam melahirkan kebijakan dan kondisi yang memungkinkan kehidupan semakin manusiawi. Adapun yang termasuk dalam hak ini adalah hak atas layanan kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Dalam UUD NRI 1945, hak ini antara lain terkandung dalam Pasal 27 (ayat 2), Pasal 31, dan Pasal 34.

3. **Generasi Ketiga: Hak Ekonomi, Sosio-Kultural-Kolektif**

Generasi ketiga hak asasi manusia adalah bagian dari pengakuan akan perlindungan terhadap keseluruhan hidup manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, baik di satu komunitas maupun antarkomunitas. Terdapat pemahaman bahwa hidup kita dipengaruhi oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Berbagai hal tersebut harus dilindungi. Hak yang termasuk dalam generasi ketiga ini adalah hak perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, hak ekonomi dan pembangunan, hak menentukan nasib sendiri, dan sebagainya. Dalam UUD NRI 1945, hak ini antara lain terkandung dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 (ayat 3), dan Pasal 34.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dipayungi oleh sila Kemanusiaan dalam Pancasila serta yang termuat pula dalam UUD NRI 1945 menyiratkan nilai gotong royong. Melalui perlindungan hak asasi manusia, tersirat pengakuan akan kebersamaan, kerja bersama demi kebahagiaan bersama. Dalam kaitan ini, negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Selain itu, perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia juga harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Kita harus menyadari bahwa setiap orang dilindungi hak asasinya oleh Pancasila dan UUD, sehingga kita tidak boleh melanggar hak asasi tersebut. Prinsip melindungi hak asasi teman, saudara, dan setiap orang ini merupakan bagian dari nilai gotong royong karena di dalam sikap tersebut termuat kehendak untuk membangun kebersamaan demi kebahagiaan bersama.

Sikap adil dan beradab inilah yang menjadi dasar bagi seorang warga negara dapat melaksanakan gotong royong dengan warga negara lain. Dengan kata lain bahwa gotong royong tidak mungkin terlaksana jika tidak didasari oleh sikap adil dan beradab.



Gambar 1.4 Potret pengabdian pengajar muda Indonesia dalam memberikan akses terhadap hak pendidikan bagi anak-anak di tanah Papua.

Sumber: GTP UGM (Courtesy Photo), 2019

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sukarno dan Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan “kebangsaan”. Sila ini memberi pesan bahwa setiap warga negara Indonesia harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya akan perbedaan (ras, agama, suku, golongan), namun memiliki satu ikatan batin yang kuat yakni kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Pada pidato lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyatakan, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang saja, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu”. Inilah yang disebut sebagai negara nasional, yakni negara yang menyatukan semua komponen bangsa dan negara di bawah panji persatuan nasional.



Gambar 1.5 Bersama dalam keberagaman.

Sebagai bangsa majemuk dengan beragam suku, ras, etnik, agama, bahasa, dan pandangan sosial-politik, Indonesia bisa berdiri karena prinsip persatuan nasional, atau persatuan Indonesia. Hal ini merupakan komitmen dari para pendiri bangsa yang menjadikan persatuan sebagai prinsip utama dalam mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa persatuan, maka bangsa kita akan terpecah belah menjadi suku-suku bangsa yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga Indonesia tidak akan lahir sebagai negara tersendiri. Dalam membangun persatuan tersebut, bangsa kita disatukan oleh pengalaman sebagai masyarakat terjajah, yang memiliki kehendak sama, yakni mendirikan sebuah negara merdeka.

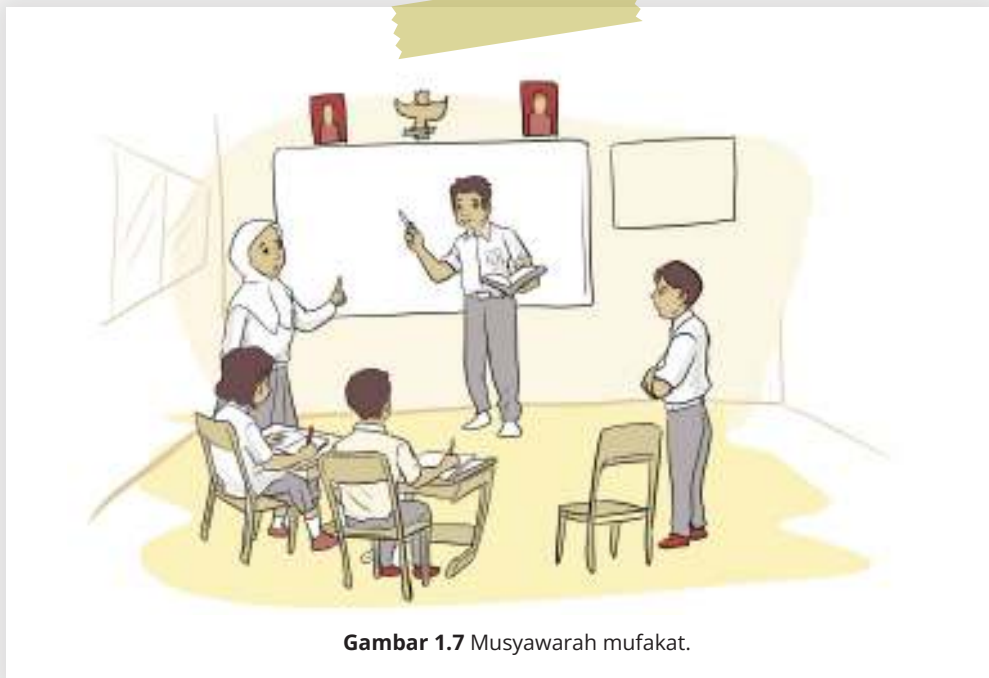


Gambar 1.6 Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi cerminan persatuan bangsa.

Sumber: Kompas.com, 2020

Prinsip persatuan demi membangun negara nasional merupakan cerminan dari nilai gotong royong. Para pendiri bangsa dan masyarakat kita telah bahu-membahu, bergotong royong dalam mendirikan negara melalui persatuan nasional untuk menyatukan berbagai perbedaan. Dengan demikian, Indonesia adalah negara gotong royong yang anggotanya saling membantu, menyingkirkan perbedaan, dan membangun titik temu demi terbangunnya negara satu untuk semua warga negara.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menjelaskan bahwa demokrasi bangsa Indonesia berdasarkan demokrasi perwakilan dengan segala proses pengambilan keputusan mengedepankan asas “musyawarah mufakat”.



Gambar 1.7 Musyawarah mufakat.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan memuat beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Negara kita menganut sistem politik demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Artinya, negara diselenggarakan berdasarkan daulat rakyat, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong. Sebab, negara tidak dikuasai oleh seorang raja sebagaimana dalam kerajaan atau monarki, tidak pula oleh seorang penguasa yang diktator sebagaimana dalam negara otoriter, tidak pula oleh segelintir penguasa atas nama satu agama sebagaimana dalam negara teokrasi. Kekuasaan berada di tangan rakyat melalui sistem perwakilan di dalam parlemen, serta melalui pemilihan pemimpin pemerintahan seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Melalui demokrasi, negara kita dimiliki oleh rakyat. Semua rakyat atau warga negara berhak untuk terlibat dalam proses pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, kedaulatan rakyat ini lahir dari nilai-nilai Ketuhanan, sebagaimana hubungan sila Kerakyatan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, di dalam ajaran agama kita, memegang amanat dan kepercayaan rakyat, termasuk di dalamnya menyejahterakan rakyat merupakan tugas pemimpin yang diamanatkan oleh Tuhan.
2. Demokrasi Pancasila mengutamakan mekanisme perwakilan dan permusyawaratan. Artinya, setiap warga negara melalui kelompok sosial-politiknya memiliki hak terwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sistem perwakilan ini dilakukan melalui partai politik yang bebas didirikan oleh warga negara asalkan mampu mencapai batas keterwakilan yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan sistem perwakilan ini, maka negara kita menjadi negara gotong royong di mana semua kelompok memiliki hak yang sama untuk mewakili rakyat dalam DPR melalui sistem pemilihan umum (pemilu). Demikian pula wakil rakyat dalam menyusun kebijakan (undang-undang), mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat meskipun keputusan akhir dalam sidang MPR RI berdasarkan pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan melalui suara terbanyak.



Gambar 1.8 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mencapai mufakat dengan cara musyawarah.

Sumber: republika, 2018

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjelaskan bahwa setiap warga negara khususnya pelajar Indonesia mampu untuk mengembangkan sikap berbagi, peduli dan kolaborasi. Sikap-sikap tersebut tentunya akan terwujud jika sudah tertanam nilai-nilai ketuhanan dalam bentuk toleransi antar sesama, sikap adil dan beradab dalam bentuk perilaku tidak diskriminatif kepada orang lain, selalu berpikir dan bertindak mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok, selalu mengutamakan bermusyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Sikap berkeadilan sosial inilah yang dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong dalam kehidupan.



Gambar 1.9 Aksi sosial warga.

Menurut Sukarno, gotong royong menjadi inti nilai Pancasila karena sila-sila Pancasila mencerminkan prinsip kebersamaan/persatuan dan kerja sama demi kebahagiaan/kesejahteraan bersama.

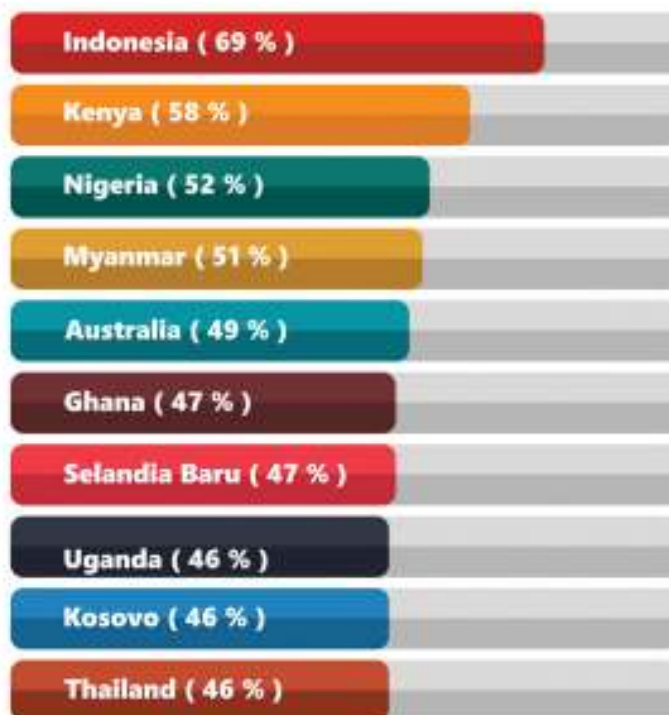
B. Praktik Nilai Gotong Royong

Sebagai bentuk perilaku nilai-nilai Pancasila, gotong royong bagi bangsa Indonesia bukan hanya ada dalam tataran konsep dan teori belaka, tetapi sungguh hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Gotong royong bukan hanya merupakan nilai yang termuat di dalam Pancasila. Akan tetapi, telah dipraktikkan oleh masyarakat kita, dan bahkan telah menjadi tradisi bangsa kita. Hal ini juga membuktikan bahwa Pancasila tidak hanya terhenti sebagai nilai-nilai yang mengawang, tetapi telah menjadi praktik hidup masyarakat Indonesia. Inilah makna Pancasila sebagai pandangan hidup dan jalan hidup kita.

Praktik gotong royong dari bangsa kita bahkan telah diakui oleh dunia. Pada laporan terakhirnya, *Charities Aid Foundation* (CAF) dalam laporannya tentang *CAF World Giving Index* per-Juni 2021 menempatkan Indonesia pada posisi nomor 1 dari 144 negara yang disurvei oleh lembaga ini. Pada survei tersebut, Indonesia menempati negara paling dermawan di dunia. Terdapat tiga indikator penilaian pada survei tersebut, untuk menilai kedermawanan sebuah negara. *Pertama*, sumbangan kepada orang lain. *Kedua*, mendonasikan uang. *Ketiga*, orang-orang yang mau menjadi sukarelawan di negeri tersebut. Dari ketiga indikasi ini, Indonesia memiliki nilai tertinggi dalam hal orang-orang yang mau menjadi sukarelawan, yaitu sebanyak 69%.

Daftar Negara Paling Dermawan di Dunia 2021



Gambar 1.10 Daftar Negara Paling Dermawan di Dunia Tahun 2021

Sumber: *Charities Aid Foundation (CAF), Juni 2021*

Nilai tertinggi dalam hal kesukarelawanan (volunterisme) masyarakat kita yang diakui oleh dunia ini menjadi bagian dari semangat gotong royong. Contohnya saja kehidupan masyarakat di kampung. Para tetangga secara sukarela membantu tetangganya yang sedang membangun rumah atau sedang memiliki acara seperti pernikahan, kelahiran, hingga kematian. Semua tindakan sukarela itu tidak dipungut biaya karena lahir dari rasa kepedulian dan kebersamaan yang telah menjadi tradisi. Tidak hanya di kampung, gotong royong juga masih terjadi di masyarakat kota. Apalagi di era teknologi digital yang mempertemukan kita dengan sesama melalui media sosial. Berbagai kedermawanan seperti pemberian sumbangan, donasi, dan sukarelawan seperti yang disurvei oleh CAF di atas, terjadi di masyarakat kota dengan pola hidup yang serba digital.

Kita harus bangga dengan semangat gotong royong tersebut karena telah menjadi tradisi yang dipraktikkan secara turun-temurun. Berikut ini contoh tradisi gotong royong yang terdapat di masyarakat Indonesia.

1. *Ngayah*



Gambar 1.11 Potret tradisi Ngayah di Bali.

Sumber: bali.polri.go.id

Ngayah berarti pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama yang berkembang di masyarakat Bali. *Ngayah* merupakan istilah bagi seseorang atau kelompok yang bekerja tulus tanpa mendapatkan imbalan materi. Menurut masyarakat Bali, dengan melakukan *Ngayah*, seseorang telah menunaikan kewajiban sosial sekaligus ajaran *Dharma* Hindu. *Ngayah* biasanya dilakukan melalui gotong royong di *Banjar* (sejenis wilayah Rukun Tetangga) atau di tempat suci (Pura).

2. *Marsialapari*

Marsialapari merupakan tradisi gotong royong yang ada di masyarakat Mandailing, Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan dalam pengelolaan sawah. Arti *marsialapari* adalah saling mengambil hari, yaitu sejenis gotong royong secara bergiliran. Contoh *marsialapari* yang dilakukan oleh empat orang. Pada hari pertama mereka gotong royong di sawah si A, hari kedua gotong royong di sawah si B, besoknya lagi di sawah C, dan selanjutnya di sawah D. Kegiatan *Marsialapari* umumnya dilakukan pada waktu menanam, memanen padi, hingga pekerjaan di ladang.



Gambar 1.12 Potret tradisi Marsialapari di Sumatera Utara.

Sumber: merdeka.com, 2020

3. *Marakka' Bola*

Marakka' Bola merupakan tradisi gotong royong dalam memindahkan rumah pada masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Proses pemindahan rumah panggung tersebut dilakukan oleh tenaga manusia secara bersama-sama.



Gambar 1.13 Potret tradisi Marakka' Bola pada masyarakat Bugis.

Sumber: Lomba Foto Revolusi Mental, (2017)

Tentu tradisi gotong royong tidak hanya terdapat pada tiga tradisi di atas. Masih banyak tradisi yang hidup di masyarakat Indonesia yang mencerminkan sikap gotong royong. Sebagai pelajar kita harus memahami dan mengamalkan nilai gotong royong sebagai inti Pancasila, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga lingkungan bangsa dan negara.



Kamu Harus Tahu!

Istilah gotong royong dipopulerkan oleh Sukarno, ketika sidang BPUPK pertama. Dalam pidatonya di hari terakhir sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno memberikan jawaban atas pertanyaan ketua BPUPK

Radjiman Widyodiningrat, yang bertanya di awal sidang kepada semua peserta, “Saudara-saudara, kita mau merdeka, tetapi apa dasarnya?”.

Sukarno menjelaskan “Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta *filosofische grondslag*, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu *Weltanschauung*”, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu”.

Filosofische grondlag atau *Weltanschauung* inilah yang oleh Sukarno disebut dengan istilah Pancasila, dengan dasar pertama “Kebangsaan Indonesia”; dasar kedua “Internasionalisme atau peri-kemanusiaan”; dasar ketiga “mufakat atau demokrasi; dasar keempat “kesejahteraan sosial”; dan dasar kelima “bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Namun Sukarno juga memberikan pilihan kepada peserta sidang BPUPK jika tidak setuju dengan konsep lima dasar. Menurut Sukarno Pancasila dapat diperas menjadi “Trisila”. Sukarno menjelaskan, “Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-darinya Indonesia Merdeka, *Weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan “socio-nationalisme”. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke* demokrasi dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan “*socio-democratie*”. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.

Tidak sampai di Trisila, Sukarno juga memberikan usulan tentang gagasan lain jika peserta sidang tidak setuju dengan konsep Pancasila dan Trisila, yakni konsep Ekasila. Sukarno menjelaskan, “...*Barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia,*

yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulus, yaitu perkataan "gotong royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!".

Perasan Sukarno dari Pancasila menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila, menjelaskan bahwa bagi Sukarno inti dari Pancasila adalah terwujudnya perilaku manusia Indonesia yang "bergotong royong". (sumber naskah pidato Sukarno 1 Juni 1945)



Setelah mempelajari materi di atas, kalian diharapkan mampu mencapai capaian kompetensi dari pembelajaran ini, yakni:

Pertama, kalian mampu memahami akan pentingnya gotong royong sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami akan pentingnya gotong royong seperti dijelaskan oleh Sukarno, bahwa gotong royong adalah kerja keras bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan perjuangan bantu-membantu, amal semua buat semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Gotong royong yang disebut oleh Sukarno sebagai Eka sila, merupakan pemerasan dan inti dari Pancasila. Sementara bagi Muhammad Hatta, gotong royong merupakan karakter bangsa Indonesia yang bersifat kolektif atau kebersamaan, tidak individualitas. Sehingga seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia haruslah berdasarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau kebersamaan.

Kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendasari. Gotong royong merupakan bentuk perilaku sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Gotong royong didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

Ketiga, bahwa gotong royong menjadi karakter bangsa Indonesia sejak bangsa ini ada. Gotong royong dapat kita lihat dari berbagai istilah yang hadir di berbagai daerah, seperti *Ngayah* (Bali), *Sambatan* (Gunung Kidul, Yogyakarta), *Masohi* (Maluku), *Gemohing* (NTT), *Liliuran* (Sukabumi, Jawa Barat), *Mapalus* (Minahasa), *Alang Tulung* (Aceh) *Ammosi* (Sulawesi Tengah), *Ngacau Gelamai* (Bengkulu), *Alak Tau* (Dayak Rindang Benua), *Marsialapari* (Sumatera Utara), *Nugal* (Kalimantan Barat), *Song Osong lombhung* (Madura), *Mappalette Bola* (Sulawesi Selatan), *nyambungan-nyambungan* (Suku Baduy), *Kuriak* (Subang), *Sabilulungan* (Sunda, Jawa Barat), *Batobo* (Riau), *Helem Foi Kenambai Umbai* (Papua), dan lain-lain. Bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah pun merupakan hasil upaya gotong royong bangsa Indonesia.

Keempat, perilaku gotong royong merupakan perkembangan psikologis manusia, sehingga perilaku ini menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Gotong royong harus mampu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.



BAB II

IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG DALAM EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Bab II kalian diharapkan mampu:

1. mengaitkan prinsip gotong royong di dalam Pancasila dengan sistem perekonomian Indonesia yang dibangun berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945;
2. menguraikan keberadaan nilai-nilai Pancasila di dalam gagasan sistem ekonomi Pancasila atau kerakyatan;
3. membuktikan koperasi sebagai unit usaha yang mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat melalui contoh-contoh sukses koperasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
4. menjelaskan keberadaan prinsip gotong royong di dalam program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilaksanakan pemerintah;
5. mengembangkan sikap untuk mengimplementasikan gotong royong berdasarkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya di bidang ekonomi.



Pengantar

Gotong royong sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila, tidak hanya termuat di dalam sila-sila Pancasila, tetapi juga dalam praktik hidup masyarakat. Untuk itu, nilai gotong royong harus terus diamalkan. Namun, pengamalan nilai gotong royong tersebut jelas tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam kehidupan ekonomi. Jika diperhatikan, pengamalan gotong royong dalam kehidupan ekonomi tentu sangat erat kaitannya dengan cita-cita didirikannya negara Indonesia, yaitu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sebagaimana sudah dipelajari pada bab sebelumnya kiranya kalian sudah paham bahwa selain karena menyimpan prinsip persatuan dan kesatuan, gotong royong juga diperlukan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa termasuk cita-cita di bidang ekonomi dengan keberadaan usaha, amal, atau kerja bersama di dalamnya. Dengan demikian, segala kehidupan bangsa Indonesia hendaknya berdasarkan gotong royong. Implementasi gotong royong itu dalam sistem ekonomi ada dalam bentuk koperasi. Dengan itu semua, kiranya jelas bahwa gotong royong wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan perekonomian Indonesia.

Uraian-uraian pada bab ini akan mengajak kalian untuk menggali lebih dalam tentang makna dan bentuk implementasi gotong royong dalam bidang ekonomi berdasarkan Pancasila. Namun sebelum masuk ke bagian Materi Pokok kalian akan dibawa dulu untuk melihat sejumlah cerita sukses koperasi pada subbab praktik pengamalan Pancasila. Hal ini bukan hanya penting untuk membuktikan implementasi nyata gotong royong dalam kehidupan ekonomi, melainkan lebih dari itu bahwa sejumlah citra buruk yang melekat selama ini kepada koperasi harus segera dihilangkan melalui contoh-contoh keteladanan unit usaha masyarakat yang berasaskan pada gotong royong itu. Bahkan, contoh-contoh kasus yang diangkat pun tidak hanya berasal dari dalam negeri

tetapi juga dari luar negeri. Pada subbab praktik pengamalan Pancasila di bawah, kalian akan diajak untuk membuktikan bahwa memang unit usaha yang dianjurkan para pendiri bangsa tersebut, menjadi pilihan masyarakat global untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Setelah Materi Pokok, kalian diajak untuk mempelajari kembali hal-hal penting yang telah diberikan melalui ringkasan yang diberikan pada subbab refleksi. Selain berguna untuk mengingat hal-hal yang telah dipelajari, ringkasan tersebut juga akan memudahkan kalian dalam membuat peta konsep yang tentunya memudahkan kalian ketika menghadapi soal-soal evaluasi.

Pada bagian tindak lanjut aksi, kalian akan diberikan tugas, di mana salah satunya berupa riset atau penelitian kecil mengenai keberadaan koperasi dan UMKM di Indonesia melalui sumber-sumber informasi di media cetak atau internet. Sedangkan, pada bagian evaluasi, kalian akan diberikan sejumlah tugas yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan kalian dalam mengimplementasikan gotong royong di ekonomi.



Praktik Pengamalan Pancasila

Praktik ekonomi dengan prinsip gotong royong dapat dengan mudah kita temui melalui satu badan usaha bernama koperasi. Koperasi, yang asal katanya diambil dari bahasa Inggris "*cooperative/cooperation*", merupakan badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, "*Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong seorang untuk semua dan semua untuk seorang*". Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, koperasi memang mencirikan satu badan usaha yang menunjukkan jati diri perekonomian bangsa Indonesia yang berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Bagi koperasi, asas gotong royong yang terdapat di dalam dirinya berarti kesadaran bekerja sama dan tanggung jawab bersama para anggota. Sebagai anggota, mereka tidak boleh memikirkan diri sendiri. Usaha yang dijalankan koperasi menjadi tanggung jawab bersama. Keuntungan maupun kerugiannya pun ditanggung bersama.



Gambar 2.1 Potret pengembangan Koperasi Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: *infopublik.id*, 2021

Dalam kenyataannya saat ini, koperasi memang belum tumbuh menjadi unit usaha yang berkontribusi besar dalam kehidupan perekonomian

Indonesia. Masih banyak catatan-catatan negatif mengenai citra koperasi yang mudah kita temui di berbagai media saat ini. Dari mulai kompetensi SDM pengurus atau pengelola koperasi yang kurang memadai, berbagai *image* buruk koperasi pun kerap terlihat muncul dalam bentuk kasus-kasus korupsi yang menimpa para pengurusnya. Akan tetapi, kehadiran berbagai data seperti itu bukan lantas membuat kita menyimpulkan koperasi adalah unit usaha yang buruk, apalagi menyatakan gotong royong sebagai dasarnya adalah asas yang gagal.



Gambar 2.2 Potensi Produk UMKM

Sumber: Merdeka.com/arie basuki (2013)

Jika dicermati lebih luas, kiranya kita akan mendapati banyak sekali koperasi di Indonesia yang mampu menjadi sebuah unit usaha besar dengan omzet hingga puluhan triliun rupiah. Seperti yang dicatat pada 2021 dalam buku berjudul 100 Koperasi Besar Indonesia (KBI), sebanyak 100 koperasi besar di Indonesia nyata mampu memiliki aset usaha hingga 66,6 triliun dan volume perdagangan yang hampir menembus angka 60 triliun per tahun. Selain itu, buku KBI tersebut juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 500 koperasi di Indonesia yang memiliki

aset mulai dari puluhan miliar hingga triliunan rupiah dengan jumlah keanggotaan sebanyak 7.569.339 orang.



Catatan mengenai koperasi-koperasi sukses dalam buku Koperasi Besar Indonesia (KBI) tersebut jelas bukan isapan jempol atau cita-cita

yang belum sampai. Keberadaan koperasi sebagai kekuatan ekonomi gotong royong yang menyejahterakan para anggota dan masyarakat di sekitar, nyata adanya. Berbagai contoh bentuk usahanya pun beragam. Ada yang bergerak di bidang simpan pinjam, agrobisnis (usaha produk pertanian dan olahan), peternakan, produk dan jasa kesehatan, hingga telekomunikasi selular. Dengan berbagai capaian keberhasilan tersebut, mereka harus dapat menjadi *role model* atau teladan yang dapat dicontoh berbagai koperasi lain di Indonesia dalam mengembangkan unit usahanya.

Di luar negeri, keberadaan koperasi lebih menakjubkan lagi. Kita dapat mengambil contoh di Selandia Baru dan Singapura. Di kedua negara tersebut, kita akan menemukan Koperasi Fonterra (Selandia Baru) yang memproduksi berbagai produk susu dan turunannya (*dairy products*) dan Koperasi NTUC FairPrice (Singapura) yang bergerak di sektor ritel.

Melalui contoh Fonterra, sebuah koperasi yang resmi didirikan pada tahun 2001 di Selandia Baru, kita akan mendapatkan contoh bahwa jika dikelola secara serius koperasi akan mampu menjadi perusahaan yang mendunia. Tercatat pada 2010, Koperasi Fonterra telah menjadi perusahaan pengolah susu terbesar di Selandia Baru dan bahkan di dunia. Perusahaan yang dimiliki bersama oleh masyarakat itu berani merekrut kalangan profesional dan ilmuwan kelas dunia untuk menjadi pengelola perusahaan dan penjamin kualitas mutu serta inovasi produk-produknya.

Jika dicermati, keberhasilan Koperasi Fonterra tersebut bersumber pada keberadaan prinsip gotong royong yang diterapkan menjadi landasan dalam pengelolaan maupun komitmen pengembangan usaha. Karena memiliki sifat gotong royong, kebijakan Fonterra dapat selalu dikontrol oleh seluruh anggotanya secara bersama-sama. Selain itu, Koperasi Fonterra juga memiliki komitmen untuk tetap menjalin kerjasama menguntungkan dengan para peternak. Fonterra berkomitmen untuk membeli semua hasil susu dari peternak sesuai dengan kesepakatan yang dibangun bersama. Selain itu, seluruh transaksi di Fonterra pun dibuka oleh sistem manajemen yang transparan, sehingga seluruh peternak

yang menjadi mitra koperasi dapat terhindar dari risiko penjualan yang tidak adil.



Gambar 2.4 Pabrik pengolahan susu milik Koperasi Fonterra, Selandia Baru.

Sumber: Publikasi Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila

Contoh lain koperasi di luar negeri yang akan dibahas selanjutnya adalah Koperasi NTUC FairPrice, Singapura. Dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat, utamanya dari kalangan buruh, koperasi yang bergerak di bidang ritel ini telah memiliki lebih dari 370 jaringan toko. Didirikan pada tahun 1973, saat ini Koperasi NTUC FairPrice telah mampu menguasai 60% lebih pasar ritel di Singapura dengan jumlah anggota sebanyak 500 ribu orang yang juga adalah pemilik koperasi ini. Siapapun dapat menjadi pemilik koperasi dengan hak suara yang sama bagi setiap anggotanya. Pada tahun 2019, Koperasi NTUC FairPrice telah mencatatkan omzet penjualan mencapai hingga 20,1 miliar Dollar Amerika Serikat atau setara dengan 230 triliun jika dirupiahkan.



Gambar 2.5 Salah satu toko ritel milik Koperasi NTUC FairPrice, Singapura.

Sumber: Publikasi Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila

Pada dasarnya, ritel merupakan jenis usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya secara langsung. Dalam praktiknya, usaha ritel dapat dibedakan dengan usaha grosiran. Konsumen ritel tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya, sementara konsumen grosir biasa menjual kembali produk yang telah dibelinya tersebut.

Jika diperhatikan, salah satu kunci sukses Koperasi Retail NTUC FairPrice terletak pada komitmen mereka untuk menyediakan produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Berbagai standar dunia seperti ISO 9001 diterapkan menjadi jaminan atas mutu produk-produk yang diperjualbelikan melalui toko-toko milik koperasi tersebut. Bersamaan

dengan itu, koperasi NTUC FairPrice juga turut membantu perusahaan lokal yang menjadi pemasok barang agar dapat memenuhi standar-standar tersebut.

Selain komitmen untuk menyediakan produk yang terjamin mutunya, pemerintah Singapura memiliki peranan yang cukup penting dalam perkembangan Koperasi NTUC FairPrice. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Singapura selama ini, terlihat mampu mendorong koperasi yang dimiliki rakyat Singapura itu untuk dapat selalu berkontribusi kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Sebagai contoh, ketika pemerintah Singapura mengeluarkan program konsumsi produk-produk sehat, Koperasi NTUC FairPrice didorong oleh pemerintah untuk bisa memberikan respon dengan pemberian diskon khusus bagi produk-produk beras yang lebih sehat.

Dari berbagai contoh kesuksesan koperasi yang ada di Indonesia maupun luar negeri tadi, kita tentu menjadi paham bahwa memang keberadaan gotong royong dalam koperasi bukan sekedar menjadi prinsip belaka. Ia dapat muncul menjadi sebuah kekuatan yang dapat diimplementasikan oleh koperasi untuk melakukan fungsinya sebagai unit usaha perekonomian yang mewujudkan kemakmuran anggota dan masyarakat secara lebih luas. Hanya saja, untuk mewujudkan hal tersebut tentu memerlukan komitmen dan banyak upaya. Selain upaya yang berasal dari dalam koperasi itu sendiri, peran dan upaya negara sebagai pengatur sistem perekonomian nasional juga amat penting.

Nah, agar kalian lebih dapat memahami mengenai bentuk implementasi gotong royong dalam kehidupan perekonomian khususnya di Indonesia, mari simak subbab Materi Pokok di bawah ini. Di dalamnya, kalian akan menemukan berbagai alasan mengapa gotong royong sebagai prinsip atau nilai yang bersemayam dalam Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan di dalam sistem perekonomian Indonesia maupun kebijakan pemerintah.



Materi Pokok

A. Gotong Royong dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Secara sederhana, kita dapat memaknai sistem ekonomi sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan semua kegiatan ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Keseluruhan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat itu baik itu proses produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan sebagainya mesti dilihat sebagai satu kesatuan sistem dinamis yang perlu diatur agar terhindar dari kekacauan.

Jika diperhatikan seksama, para pendiri bangsa sebenarnya telah menggagas satu sistem ekonomi yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia. Sistem ekonomi tersebut bernama sistem ekonomi Pancasila, yaitu Suatu sistem ekonomi dengan ciri atau kekhasan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia karena didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi Pancasila merupakan satu sistem ekonomi yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: (1) Disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Memiliki prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Jika diringkas, pasal 33 UUD 1945 tersebut sejatinya hendak mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang

dilandasi pertanggungjawaban moral pada Tuhan Yang Maha Esa serta cita-cita bersama. Cita-cita bersama di sini tentu berbunyi “kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sementara itu, upaya atau proses yang harus dilakukan demi mencapai cita-cita tersebut adalah usaha bersama atau gotong royong.

Dengan landasan berpikir seperti itu, Arif Budimanta yang merupakan seorang tokoh pemikir ekonomi Pancasila menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila dapat disebut juga dengan istilah “sistem ekonomi kerakyatan”. Lebih lanjut menurutnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah satu sistem perekonomian nasional yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila, seperti:

1. Ketuhanan

Ketuhanan ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Inilah nilai, yang disebut oleh Hatta sebagai nilai yang memimpin menuju jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Para pendiri bangsa telah menyandarkan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila yang diinspirasi oleh nilai-nilai ketuhanan dan agama. Kepemilikan terhadap harta dalam perekonomian memiliki dimensi ketuhanan. Artinya perolehan, penguasaan dan pemanfaatan atas harta atau pendapatan, harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Berdasarkan nilai ketuhanan pula, sistem ekonomi kerakyatan merupakan perekonomian yang memiliki pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dengan demikian, perwujudan dari sistem ekonomi kerakyatan meniscayakan adanya kebaikan dan kedermawanan sebagai bagian dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui bahwa seluruh manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga. Tidak boleh ada ruang saling eksploitasi antarmanusia, begitu pun antarbangsa.

Dengan hadirnya nilai kemanusiaan tersebut, sistem ekonomi yang dilaksanakan harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk terbaik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia harus ditempatkan tidak sebatas sebagai pelaksana ekonomi produksi, melainkan juga sebagai tujuan akhir yang harus disejahterakan hidupnya. Selain itu, sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dibangun dengan berperikemanusiaan yang berarti ia harus menjamin terciptanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

3. Keterbukaan dan dinamis

Selain kemanusiaan, sila kedua dari Pancasila juga mengandung nilai-nilai keberadaban. Nilai tersebut bermakna bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang berdiri sendiri, tetapi suatu bangsa yang lahir dan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain di dunia secara beradab. Dengan demikian, sistem ekonomi kerakyatan bukanlah sistem yang anti terhadap kemajuan zaman dengan menutup diri dari pergaulan dunia. Sistem ekonomi kerakyatan tidak anti terhadap “pasar”. Pasar yang dimaksud di sini tentu bukan pasar dalam artian yang sempit seperti pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, atau lain sebagainya, melainkan pasar dalam artian yang luas yaitu interaksi dinamis antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa dengan harga yang disepakati beserta jumlah yang diperdagangkan.

Atas sikap dasar yang terbuka terhadap pasar itu, sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang mengakui dinamika aktivitas ekonomi masyarakat di dalam pasar, namun menekankan bahwa pasar tersebut harus diatur agar tercipta lingkungan ekonomi yang adil. Proses jual beli suatu produk yang terjadi melalui pasar tidak boleh berdampak pada munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, berbagai aktivitas di dalamnya harus diatur oleh pemerintah untuk menjaga keseimbangan demi terciptanya kesejahteraan bagi semua warga. Dengan semangat keterbukaan dan

dinamis seperti ini, sejatinya sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila menginginkan adanya semangat kemajuan, keterbukaan, dengan penuh kesiapan untuk menghadapi segala tantangan yang muncul di dalam pasar.

4. Persatuan

Persatuan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia, mengingat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa beserta etnis, ras, bahasa dan agama. Karena itulah, sistem ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila harus diselenggarakan dalam rangka untuk menjaga dan memperkuat persatuan nasional. Seluruh kebijakan ekonomi nasional harus memberikan ruang agar seluruh rakyat dapat berpartisipasi, sekaligus menikmati hasil secara adil dan merata. Tentu saja keadilan dan pemerataan yang dimaksud di sini bukan hanya pada aspek kewilayahan, tetapi juga pada aspek antarkelas sosial.

Dalam aspek kewilayahan, pola pengaturan ekonomi berdasarkan nilai persatuan harus diwujudkan bukan dengan pola sentralisasi, atau terpusat di ibu kota. Pengaturan sistem ekonomi kerakyatan harus dilaksanakan secara menyebar dengan menitikberatkan pada aktivitas ekonomi yang bersumber dari kekuatan lokal. Keunggulan-keunggulan yang khas dari masing-masing daerah di Indonesia perlu didorong dan didukung agar berkembang maju sehingga menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lalu, dalam aspek antarkelas sosial, perwujudan nilai persatuan dalam sistem ekonomi kerakyatan dapat dimaknai sebagai solidaritas kebangsaan yang hadir meliputi seluruh individu manusia-manusia Indonesia dari beragam kelas sosial, seperti pengusaha, pekerja, pegawai pemerintah, pedagang dan lain sebagainya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Mohammad Hatta, bahwa dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan yakni menjadi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu ada persatuan antarkelas sosial di Indonesia. Perlu ada rasa tolong-menolong dan gotong royong di dalamnya. Para pengusaha kaya dengan modal ekonomi besar harus

mau menolong yang kecil. Jadi, di dalam sistem ekonomi kerakyatan, para pengusaha kaya selalu didorong untuk memiliki sikap solidaritas kebangsaan untuk mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan agar menjadi berdayaguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain,

5. Keadilan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, cita-cita negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika diperhatikan, keberadaan kata adil yang mendahului kata makmur dalam cita-cita tersebut bermakna bahwa adil merupakan syarat mutlak untuk mencapai hidup makmur. Dengan kata lain, tanpa keadilan mustahil kemakmuran dapat dicapai.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila, nilai keadilan lebih menekankan pada pola pengaturan penggunaan sumber daya ekonomi dalam hal produksi seperti sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja dan lain sebagainya. Dengan demikian, keadilan dalam konteks sistem ekonomi kerakyatan merupakan satu nilai yang mensyaratkan agar kepemilikan atas modal, alat-alat industri, teknologi modern, sumber daya alam, tenaga kerja dan lain sebagainya dilaksanakan untuk mencapai cita-cita bersama. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa keadilan dalam sistem ekonomi Pancasila bukan berarti menolak kepemilikan industri oleh seseorang atau kelompok, melainkan menolak jika kepemilikan tersebut hanya membawa keuntungan bagi segolongan kecil masyarakat saja.

Selain itu, hadirnya nilai keadilan dalam sistem ekonomi juga membuat negara sebagai pengatur harus menjamin setiap warganya bisa mendapatkan akses/peluang yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui peraturan yang adil serta kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha perekonomian golongan kecil. Upaya tersebut sejatinya merupakan bentuk pemerataan ekonomi yang sangat menentukan kuat-lemahnya persatuan nasional. Jika akses terhadap kesejahteraan tidak terbagi secara merata, kecemburuan

sosial dan konflik kelas sosial pasti akan muncul dan persatuan nasional pun akan melemah.

Inilah makna keadilan yang penting ketika membicarakan keberadaan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Bahwa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, negara perlu melakukan pemerataan atas akses sumber daya ekonomi melalui peraturan yang adil serta kebijakan yang memihak (afirmasi) pada golongan ekonomi lemah. Hal ini tentu saja sangat dibutuhkan untuk menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan bagi semua masyarakat.

B. Implementasi Gotong Royong dalam Program Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Setelah mempelajari subbab di atas, kalian tentu telah paham bahwa dalam sistem ekonomi Pancasila penekanannya pada terciptanya rasa persatuan dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai pengatur sistem perekonomian nasional, negara dalam hal ini perlu melakukan pemerataan atas akses kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini tentu menjadi penting dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Jika dilihat dalam berbagai rencana pembangunan ekonomi yang dimiliki pemerintah, upaya-upaya tersebut sebenarnya terlihat muncul secara konsisten baik dalam rencana jangka panjang (kurun waktu 25 tahunan) maupun jangka menengah (kurun waktu 5 tahunan). Kesemuanya dihadirkan melalui program-program pemberdayaan usaha perekonomian masyarakat kecil seperti unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang dalam sifatnya disebut sebagai program prioritas nasional, atau program yang dianggap penting untuk dilaksanakan.

Sejak tahun 2005, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau yang lebih sering disebut dengan singkatannya RPJP, negara

atau pemerintah telah berkomitmen untuk membangun UMKM dan koperasi sehingga dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif pada tahun 2024. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rencana untuk membangun aspek kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dari dua unit usaha tersebut. Selain dengan memanfaatkan hasil inovasi dan penerapan teknologi, cara membangun Koperasi dan UMKM dalam RPJP ini juga diupayakan melalui pengembangan jenis usaha serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki keduanya.



Namun demikian, di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang digagas pada tahun 2020, pemerintah juga telah menjabarkan beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan koperasi dan UMKM selama lima tahun ke depan, seperti: (1) masih adanya peraturan pemerintah yang kurang mendukung perkembangan bisnis UMKM dan koperasi; (2) sokongan dan dukungan pemerintah yang tidak konsisten; (3) kurangnya pengawasan atas koperasi serta pendampingan bagi UMKM; (4) kompetensi SDM pengurus

atau pengelola koperasi kurang memadai; (5) keterlambatan koperasi dalam mengadopsi teknologi informasi.

Dari tantangan tersebut, RPJMN 2020–2024 kemudian merencanakan upaya pembangunan UMKM dan koperasi melalui beberapa kegiatan prioritas, di antaranya: *Pertama*, penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan bahwa pada tahun 2024 harus terjadi peningkatan jumlah wirausaha/pengusaha nasional yang berkecimpung dalam kehidupan perekonomian.

Selain diberikan melalui pelatihan kewirausahaan dan modal yang menysasar pada masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mahasiswa serta pengusaha dari daerah tertinggal, realisasi atas kegiatan ini juga dilakukan dengan jalan penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi. Harapannya, melalui penguatan kelembagaan, UMKM dan koperasi dapat tumbuh menjadi sentra atau pusat-pusat ekonomi kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya sumber daya manusia dan keorganisasian yang kuat seperti ini, diharapkan Koperasi dan UMKM pada tahun 2024 sudah bisa memiliki kapasitas produksi barang dan jasa yang mampu mengisi 65% Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari Produk Nasional Bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga, PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

Kedua, peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah Besar. Dalam pelaksanaannya, kegiatan kemitraan ini dilakukan melalui beberapa jalan yang tujuannya agar berbagai hasil produksi UMKM dan koperasi dapat dipasok menjadi barang atau jasa yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar maupun lembaga-

lembaga pemerintahan. Selain melalui pengembangan kualitas produk dan standarisasi mutu, upaya-upaya pemerintah dalam merealisasikan kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pemberian akses kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar yang diikuti oleh pembinaan atau pendampingan. Dalam hal ini, pemerintah pun menargetkan bahwa pada tahun 2024, harus terjadi peningkatan jumlah kemitraan. Jika pada tahun 2020 jumlahnya baru mencapai 1.700, maka pada tahun 2024, jumlahnya harus pada kisaran angka 2.300.

Ketiga, peningkatan akses permodalan. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, kegiatan peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi dilakukan dengan jalan menciptakan skema pengembalian pinjaman modal yang mudah dan murah, utamanya kepada wirausaha baru (*start up capital*) yang berasal dari kelompok generasi muda, santri dan perempuan. Demi menjamin kelancarannya, berbagai pinjaman modal yang diberikan oleh pemerintah pun diikuti berbagai fasilitas pendampingan yang dapat membuat para pengusaha kecil, baru, maupun kreatif itu tidak kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal. Dari angka yang tertera dalam RPJMN, dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk permodalan koperasi dan UMKM ini terbilang besar dan terus menerus meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2020, angka pendanaan yang ditargetkan adalah sebesar 62,4 triliun rupiah, maka pada tahun 2024 jumlahnya meningkat sampai dengan 85 triliun rupiah.

Selain tiga kegiatan tersebut, Pemerintah saat ini juga sedang melaksanakan program pemberdayaan koperasi dan UMKM yang diberi nama “UMKM *go online*”. Selain bertujuan untuk menambah daya jangkau produk agar menjadi lebih luas, program ini juga diharapkan mampu membantu koperasi dan UMKM untuk menjadi sebuah *platform* bisnis atau perdagangan *online*, yang menjangkau komunitas lokal, nasional, bahkan global.

Dalam pelaksanaannya, program ini dilakukan dengan jalan memberikan bimbingan langsung kepada para pelaku koperasi dan UMKM untuk dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi secara *online* mulai

dari pembukaan akun hingga strategi pemasarannya di media sosial. Program pemberdayaan yang dilakukan sejak tahun 2020 ini berturut-turut menargetkan angka 7.000, 18.000 dan 33.000 UMKM pada tahun 2024 untuk menjadi UMKM yang mampu mengadopsi kecanggihan teknologi 4.0 dalam melakukan proses perdagangan secara *online* (*scaling up*).



Gambar 2.7 Infografik Program

Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024

Disadari atau tidak, revolusi industri ke-4 yang terjadi saat ini sesungguhnya memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan ekonomi ke depan, termasuk bagi usaha masyarakat kecil yang tergabung dalam UMKM dan koperasi. Maka dari itu, pemerintah pun harus selalu bisa mengantisipasinya dengan berbagai program kebijakan yang dapat menjaga eksistensi kedua bentuk usaha rakyat kecil ini agar dapat terus menciptakan pekerjaan dan peluang-peluang baru bagi masyarakat. Mengingat, selain UMKM dan koperasi merupakan unit usaha yang mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional, kehadirannya sebagai pelaku ekonomi merupakan wujud implementasi gotong royong yang

nyata dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Setelah membahas berbagai uraian dalam praktik pengamalan Pancasila dan Materi Pokok di atas, ada beberapa hal yang penting untuk kalian catat sebagai bahan refleksi, yaitu:

Pertama, gotong royong menyimpan prinsip persatuan-kesatuan nasional serta kerjasama aktif yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi Indonesia demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kedua, berbagai contoh kesuksesan koperasi yang ada di Indonesia maupun luar negeri membuktikan bahwa keberadaan gotong royong dalam kehidupan ekonomi bukan sekedar menjadi prinsip belaka. Ia dapat muncul menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang mendunia jika dapat diimplementasikan secara baik melalui komitmen kuat, pengelolaan yang serius, pengawasan maksimal, serta inovasi yang tiada henti. Selain beberapa faktor internal itu, peran negara atau pemerintah sebagai pengatur sistem ekonomi juga penting, khususnya melalui berbagai kebijakan yang bisa mendorong kemajuan koperasi tersebut.

Ketiga, wujud implementasi gotong royong yang terpenting dalam ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yaitu sebuah sistem ekonomi dengan ciri atau kekhasan tersendiri yang didasari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sistem ekonomi Pancasila dapat dipandang sebagai satu sistem ekonomi yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara yang dilandasi pertanggungjawaban moral pada Tuhan Yang Maha Esa serta cita-cita bersama bangsa Indonesia.

Keempat, sistem ekonomi Pancasila dapat disebut juga dengan istilah lain yaitu sistem ekonomi kerakyatan yaitu sebuah sistem ekonomi

yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, keterbukaan dan dinamis, persatuan dan keadilan. Dengan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut, sistem ekonomi berdasarkan Pancasila menghendaki negara sebagai pengatur harus dapat menjamin setiap warganya bisa mendapatkan akses/peluang yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Caranya dengan menghadirkan peraturan yang adil serta upaya peningkatan kapasitas usaha perekonomian golongan kecil.

Kelima, sebagai pengatur sistem perekonomian nasional, negara perlu melakukan upaya-upaya serius untuk dapat mendorong peningkatan kemampuan usaha perekonomian masyarakat kecil seperti Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, melalui berbagai program yang terencana dan diprioritaskan secara nasional. Selain penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di tengah masyarakat, peningkatan kemampuan usaha UMKM dan koperasi juga sangat dibutuhkan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan wujud implementasi gotong royong dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

BAB III

HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di bab III, kalian diharapkan akan dapat:

1. menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berdasarkan Pancasila;
2. menguraikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur Pancasila yang harus diwujudkan dalam pembangunan nasional;
3. menganalisis akan pentingnya keberadaan lima indikator dari pembangunan nasional;
4. mempresentasikan sepuluh sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila;
5. ikut terlibat aktif di musyawarah dalam rangka menyusun pembangunan nasional.



Pengantar

Pembangunan adalah serangkaian usaha perubahan yang direncanakan dan dilakukan menuju ke arah yang lebih baik. Ide pokok pembangunan adalah suatu tahapan atau proses yang tanpa akhir, yang secara sadar dilaksanakan dan berkesinambungan.

Pembangunan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang hasilnya bisa dilihat atau dirasakan secara langsung. Contohnya pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sementara pembangunan non fisik seperti pembangunan kualitas SDM, pembangunan karakter yang baik, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Suatu negara harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan pembangunan termasuk juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menjalankan pembangunan negara, Indonesia bertumpu pada dasar negara sebagai landasan dalam melakukan pembangunan nasional. Pertanyaannya, dasar negara apakah yang dijadikan sebagai tumpuan dalam melakukan pembangunan nasional? Jawabannya adalah Pancasila.

Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana konsep pembangunan Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. Namun, sebelum memasuki inti pembahasan tersebut, mari coba kita ulang kembali apa saja sila dalam Pancasila itu.

Dalam lima sila yang ada dalam Pancasila, terkandung makna mendalam yang menjadikannya sebagai dasar negara. Lima sila yang ada dalam Pancasila harus kita amalkan secara menyeluruh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya, sila pertama merupakan sila Ketuhanan. Kita tidak cukup hanya melaksanakan

sila Ketuhanan saja dalam mengamalkan Pancasila, tetapi juga harus melaksanakan empat sila yang lainnya.

Pada pembahasan bab ini, kita akan mempelajari sila yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yakni sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa sila kelima ini menjadi panduan dalam melakukan pembangunan nasional? Apa kaitan antara pembangunan nasional dengan nilai keadilan sosial yang ada pada sila kelima? Mari kita bahas secara lebih mendalam dalam subbab berikut.



Praktik Pengamalan Pancasila

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan apabila melibatkan semua unsur, atau lebih dikenal dengan pembangunan yang bersifat partisipatori. Pembangunan partisipatori merupakan pembangunan yang melibatkan semua pihak mulai dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pembangunan itu. Pelibatan masyarakat tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Dengan demikian, pembangunan partisipatori adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari pembangunan itu.

Sebagai subjek pembangunan, masyarakat harus aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan terutama jika pembangunan tersebut mencakup hajat hidup orang banyak. Pada titik ini, partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan. Jika partisipasi masyarakat tidak terjadi, dikhawatirkan hasil dari pembangunan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses pembangunan seperti ini sebetulnya adalah wujud dari implementasi Pancasila dalam pembangunan.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Musrenbangnas 2021 dalam rangka strategi bangkitnya Indonesia dari pandemi covid-19.

Sumber: bappeda.jakarta.go.id

Salah satu contoh penerapan Pancasila dalam proses pembangunan itu adalah adanya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Inti dari adanya Musrenbang adalah untuk melakukan rembuk/musyawarah dalam proses pembangunan dengan melibatkan semua pihak.

Pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, regulasi lain yang mengatur Musrenbang di tingkat nasional dikeluarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedangkan untuk tingkat daerah, Musrenbang diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sementara di tingkat paling bawah, yakni kelurahan/desa ada yang namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan Musrenbangdes ini melibatkan semua unsur yang ada di kelurahan/desa mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda (seperti Karang Taruna), organisasi kemasyarakatan (seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Posyandu), serta organisasi lain yang ada di masyarakat. Pada intinya, dalam kegiatan Musrenbangdes pemerintah desa/kelurahan menyerap aspirasi dari semua kalangan, dari semua pihak yang terkait.



Gambar 3.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes).

Jadi musyawarah dalam rangka menyusun rencana pembangunan itu terdiri dari beberapa tingkatan. Mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kota/Kabupaten, Musrenbang tingkat Provinsi, hingga Musrenbang tingkat Nasional.



Materi Pokok

A. Pengertian Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila

Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tugas dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam tugas tersebut, sangat jelas bahwa Pancasila menjadi bintang penuntun dalam proses pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan sehingga cita-cita untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang dapat tercapai.

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang bertumpu pada prinsip atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Pertama*, berdaulat dalam bidang politik; *Kedua*, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi; *Ketiga*, berkepribadian dalam bidang kebudayaan; dan *Keempat*, berasaskan gotong royong. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu yang disampaikan oleh Presiden Sukarno pada pidato hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1964.

Setidaknya, ada lima indikator utama dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. *Pertama*, pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu berupa pemenuhan sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, terjaminnya fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, adanya jaminan hari tua. *Keempat*, adanya jaminan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat rohaniah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kelima*, adanya jaminan untuk menjalani

kehidupan di lingkungan yang sehat dan layak sehingga menciptakan tatanan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram.

Terlihat bahwa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, maka seyogyanya Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai tumpuan dalam melaksanakan proses pembangunan. Selain itu, proses pembangunan berdasarkan Pancasila juga menjadi alat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan menjadi bangsa yang unggul, beradab dan berkepribadian kuat. Tujuan besar ini harus dapat direalisasikan dalam semua aspek, bukan hanya aspek fisik saja seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan yang bersifat nonfisik seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, politik, dan kebudayaan.



Gambar 3.3 Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui penguasaan ilmu dan teknologi.

Sumber: bppt.go.id

Pembangunan yang sifatnya nonfisik seperti pembangunan SDM dalam konteks saat ini ditekankan pada penguasaan bidang iptek (ilmu dan teknologi) tentu tanpa melupakan pembangunan dari sisi karakternya. Terlebih saat ini kita hidup di era globalisasi. Tantangan era globalisasi ke depan terletak pada penguasaan teknologi. Ketatnya persaingan dalam

dunia teknologi mengharuskan kita untuk ikut serta bergerak dalam penguasaan teknologi, sehingga sumber daya manusia Indonesia dapat turut bersaing secara global. Semua itu demi tercapainya cita-cita bangsa untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain dan meningkatkan harkat dan derajat bangsa Indonesia.

Sementara itu, pembangunan dalam bidang politik diarahkan untuk mencapai kehidupan politik yang berdaulat. Bangsa Indonesia harus berdaulat hidup di tanah air sendiri. Untuk mencapai itu semua, seluruh elemen bangsa harus mampu bersatu padu. Termasuk juga dalam membangun kekuatan bangsa, optimalisasi sumber daya manusia, teknologi dan modal pembangunan lainnya.

Pembangunan dalam bidang ekonomi diarahkan lebih kepada kemandirian dalam bidang ekonomi. Kemandirian bidang ekonomi diartikan sebagai kemandirian dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Sejauh ini perlu diakui bahwa kita masih banyak menggunakan produk-produk buatan luar negeri. Hal tersebut kiranya dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Atas dasar hal tersebut, arah pembangunan nasional ke depan seharusnya ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan bangsa berdasarkan kemandirian ekonomi, misalnya dengan pengembangan dan penggunaan produk-produk dalam negeri. Hal tersebut lambat laun tentu dapat meningkatkan potensi kemandirian ekonomi bangsa.

Pembangunan budaya diarahkan pada upaya ketahanan budaya yang dicapai melalui upaya pengembangan dan pelestarian budaya. Kita menyadari bahwa dinamika perubahan akibat tuntutan zaman yang kental akan serbuan budaya global menyebabkan kebudayaan nasional semakin terpinggirkan. Pembangunan budaya dengan aspek ketahanan budaya bukan berarti membuat kita apatis terhadap perkembangan zaman, akan tetapi melalui pembangunan budaya, kebudayaan nasional diharapkan dapat menjadi katalisator terhadap nilai-nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya global yang bersifat negatif.

B. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. *Pertama*, secara nasional, yakni dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia. *Kedua*, secara menyeluruh, artinya pembangunan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya pada satu atau dua aspek semata. *Ketiga*, secara terstruktur dan sistematis, artinya pembangunan harus dilakukan secara terencana. Rencana dalam pembangunan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, terarah, dan terukur dalam waktu tertentu.

C. Sasaran Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pembangunan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Artinya, pembangunan dilaksanakan dalam semua aspek dalam kehidupan berbangsa. Aspek-aspek dalam pembangunan tersebut akan kita diskusikan dalam pembahasan di bawah ini.

1. Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Gambar 3.4 Ilustrasi Kemajuan Teknologi.

Pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ini merupakan amanat yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan adanya bangsa Indonesia ini adalah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sehingga punya daya saing yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Berikut adalah poin-poin pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi berdasarkan Pancasila:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi, serta berkeadilan sosial melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berpadanan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu berkompetisi di era globalisasi;
- b. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian Pancasila melalui pembentukan pelajar yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleran, menghargai keberagaman, berperspektif gender, berwawasan lingkungan, berjiwa gotong royong, dan bersemangat kebangsaan dan terbuka terhadap perkembangan global;
- c. Menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, dengan tujuan utama menumbuhkan budaya gotong royong dan kekeluargaan, sikap toleran, pluralis, menghilangkan sikap kosmopolitanisme, individualisme, dan tangguh dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi di masa depan;
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan negara wajib memberikan prioritas pada penelitian (*research*) dan pengembangannya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup bangsa;

- e. Melaksanakan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan, serta penguatan pendidikan karakter kebangsaan Indonesia secara berkelanjutan untuk semakin relevan dengan tantangan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Menumbuhkembangkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai dan budaya berkehidupan Pancasila, sebagai landasan untuk menjadi masyarakat terbuka yang mampu memilah dan memilih nilai positif, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, tetapi tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya sebagai bangsa Indonesia;
- g. Meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan melalui pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, pendidikan khusus maupun pendidikan tinggi dengan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan;
- h. Mengarusutamakan kebudayaan yang bersumber dari kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara untuk menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan untuk menciptakan kesejahteraan bangsa;
- i. Memajukan kebudayaan sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan budaya tradisi melalui pengembangan interaksi budaya, dalam rangka memperkaya keragaman budaya, yang mencerdaskan, menyejahterakan, dan menciptakan perdamaian;
- j. Mendorong dan menciptakan iklim kemajuan teknologi yang mendorong revolusi industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang berpengaruh positif pada sektor-sektor kehidupan;
- k. Menciptakan sinergi antara kebudayaan dan dunia industri untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman dan mampu berinteraksi di tataran lokal maupun global dengan tetap berkarakter Pancasila;

- I. Meningkatkan derajat dan martabat sumber daya di bidang kebudayaan sebagai komponen pokok pembangunan berkelanjutan, serta pelestarian berbagai warisan budaya antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

2. Pembangunan Bidang Agama dan Kepercayaan



Gambar 3.5 Ilustrasi seseorang membantu nenek yang sedang menyeberang.

Selain pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pembangunan bidang agama juga tidak kalah penting. Utamanya pembangunan berdasarkan Pancasila sila pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan bidang agama menjadi penting dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan berdasarkan Pancasila. Mengapa pembangunan berdasarkan Pancasila menjadi penting? Karena Pancasila juga mencakup nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal. Bersifat universal artinya, nilai agama dalam Pancasila tidak hanya tertuju atau condong pada salah satu agama saja, melainkan kepada semua agama yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah poin-poin pembangunan dalam bidang agama berdasarkan Pancasila:

- a. Melaksanakan pembinaan agama yang diarahkan agar setiap warga negara dapat mengembangkan kerohanian, kepribadian, karakter ketakwaan serta sikap toleran dan menghormati keberadaan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda;
- b. Melaksanakan pembinaan agama untuk membangun masyarakat yang saleh, moderat, toleran, cerdas dan unggul, yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah moderat;
- c. Melaksanakan pembangunan untuk semua warga negara. Tidak hanya bagi yang beragama saja, tetapi juga bagi kelompok lain seperti kelompok aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada intinya, pembangunan yang ada adalah pembangunan untuk semua.
- d. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama melalui penguatan moderasi beragama dan peningkatan layanan keagamaan yang adil dan merata. Moderasi agama merupakan cara pandang, sikap, serta praktik kehidupan sehari-hari dalam beragama dengan mengejawantahkan ajaran agama yang melindungi hak dan martabat semua manusia;
- e. Pembinaan dan pembangunan rumah-rumah dan lembaga-lembaga keagamaan untuk membangun kesadaran toleransi dan moderasi antarumat beragama;
- f. Penetapan pendidikan agama untuk menjadi mata pelajaran di sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Penetapan pendidikan agama tersebut untuk memberikan kontribusi terhadap pemikiran yang kritis, tetapi toleran dan mencerahkan;
- g. Menjadikan pendidikan agama sebagai jembatan dalam menghadapi problem keautentikan dan modernitas untuk berjalan dengan harmonis. Tujuan pendidikan agama adalah untuk menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan keteguhan sikap kebangsaan;

- h. Melaksanakan pendidikan agama bukan hanya mengutamakan akidah dan teologi saja, melainkan juga pemahaman bagaimana kedudukan agama sebagai sistem sosial dalam kehidupan masyarakat yang berada di tengah-tengah sistem sosial yang lain sehingga harus ditumbuhkan, baik sikap toleransi maupun gotong royong dalam
- i. Pendidikan diarahkan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang dicapai melalui meningkatnya iman dan takwa serta akhlak mulia, dengan tujuan akhir untuk kemajuan peradaban bangsa, serta kesejahteraan umat manusia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan kehendak, emosional, sosial dan spiritual;
- j. Dalam pelaksanaan pendidikan yang selaras dengan Pancasila maka: (a) Nilai-nilai agama dan nilai-nilai persatuan bangsa mempunyai hubungan yang harus tercipta harmonis karena keduanya berkedudukan penting; (b) Proses pendidikan dan kebudayaan tidak boleh menjadi benih-benih perpecahan bangsa.

3. Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan sangat penting untuk dilakukan. Karena, suatu pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada jaminan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan di tanah air, harus berpedoman pada ciri pembangunan yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan dalam bidang ini harus dijaga dan dikuatkan dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Berikut adalah poin-poin dalam melaksanakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan berdasarkan Pancasila:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim;

- b. Merumuskan dan melaksanakan amanat konstitusi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
- c. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;



Gambar 3.6 Ilustrasi Pasukan Penanganan Terorisme Indonesia

- d. Memberi ruang pada partisipasi rakyat dan seluruh elemen masyarakat di dalam pembangunan sehingga rakyat dapat menjadi subjek dalam pembangunan;
- e. Mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional;

- f. Merevitalisasi kebijakan politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang implementasinya berpedoman pada kekuatan rakyat, dengan tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional, serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia;
- g. Semakin memperkuat usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung;
- h. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan untuk pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI yang berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI dengan mengacu pada aspek modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana;
- i. Memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat yang bertujuan untuk pengembangan *capacity building* (kemampuan) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peace Keeping Operation* (PKO) di bawah PBB. Hal ini pun termasuk dalam bagian diplomasi pertahanan.

4. Pembangunan Bidang Ekonomi

Pembangunan dalam bidang ekonomi menjadi penting karena dalam bidang ini kebijakan atau peraturan harus dilakukan untuk mengatur hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila harus dijadikan dasar dalam rangka pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan pembangunan untuk suatu kelompok atau golongan tertentu saja, tetapi pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Berikut adalah poin-poin dalam pembangunan bidang ekonomi berdasarkan Pancasila:

- a. Melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia yang mampu mewujudkan: *Pertama*, terciptanya kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong; *Kedua*, semakin menguatnya posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian; *Ketiga* terciptanya ekosistem usaha yang adil; *Keempat*, pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat; *Kelima*, terpenuhinya hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;



Gambar 3.7 Ilustrasi penguatan usaha rakyat melalui pasar tradisional.

- b. Melaksanakan pembangunan ekonomi Pancasila berdasarkan prinsip: pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian bangsa, penciptaan keadilan sosial atas dasar prinsip kebersamaan;
- c. Membangun dan merelevansikan Sistem Ekonomi Pancasila yang berpijak pada fondasi moral yang solid dan diikat oleh kemitraan negara dan masyarakat berlandaskan semangat gotong royong;
- d. Cabang-cabang produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak

- dikuasai oleh negara, dengan tetap melibatkan dan mendorong perusahaan swasta nasional agar memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada kepentingan nasional;
- e. Menghadirkan negara dalam rangka pemenuhan keadilan sosial, pembangunan koperasi dan UKM yang kuat dan bermartabat serta penguasaan penuh negara atas sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
 - f. Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dengan cara memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas dan manajemen SDM, usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha;
 - g. Menguatkan dan mengatur perlindungan bagi Koperasi dan UKM sejak mulai berusaha, deregulasi perizinan dan insentif bagi koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan menjaga jangan sampai koperasi dan UKM menghadapi persaingan yang tidak adil dalam pertarungan dengan usaha besar;
 - h. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), serta membangun lembaga keuangan yang aman bagi KUKM;
 - i. Mengedepankan peran negara untuk menyusun dan menjalankan sistem moneter yang sehat dan stabil, sebagai upaya membangun tata perekonomian nasional yang kuat dan mandiri untuk menjamin lancarnya produksi, distribusi, dan perdagangan, serta peredaran uang yang terencana.

5. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan menjadi penting dalam rangka pembangunan nasional. Selain itu, dengan kesehatan yang baik, maka kesejahteraan akan dapat dicapai. Pembangunan bidang kesehatan menjadi salah satu unsur penting bagi terselenggaranya kehidupan suatu bangsa. Sama halnya dengan pembangunan bidang kesejahteraan. Pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila tujuannya adalah tercapainya

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah poin-poin dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan:



Gambar 3.8 Ilustrasi penguatan usaha rakyat melalui pasar tradisional.

- a. Menyusun dan menyelenggarakan kebijakan di bidang kesejahteraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata di segala bidang;
- b. Menjamin tersedianya pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi setiap warga negara sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarganya. Dengan pengertian bahwa negara memberikan jaminan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan atas sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, serta jaminan sosial, termasuk jaminan hari tua;
- c. Menyelenggarakan usaha khusus untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup rakyat yang bekerja secara umum, terutama bagi para pekerja, petani, dan nelayan, serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja di dalam negeri untuk mengatasi pengangguran;

- d. Memenuhi sarana dan prasarana serta alat kesehatan maupun jaminan kesehatan, yang disertai dengan peningkatan tata kelola dan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- e. Menyediakan jaminan sosial untuk pemenuhan hak atas kesehatan yang baik, dan mewujudkan, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- f. Mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas;
- g. Mendorong produksi bahan kebutuhan pokok rakyat untuk mewujudkan pemenuhan sendiri, terutama yang berasal dari dalam negeri, serta terciptanya pendistribusian pendapatan nasional yang adil dan merata;
- h. Mendorong produksi dalam negeri yang kuat dan stabil dengan melibatkan rakyat dalam pengerahan seluruh sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta modal dan potensi lainnya dari dalam negeri;
- i. Menyempurnakan tata kelola pertanahan oleh negara, yang mampu menjamin hak rakyat atas tanah sebagai syarat mutlak dalam pembangunan menyeluruh yang berdasarkan prinsip tanah sebagai alat produksi yang dapat menghadirkan kesejahteraan;
- j. Menyusun kebijakan pertanahan yang diarahkan pada pembatasan penguasaan luas pertanahan baik secara maksimum sehingga keadilan dapat diwujudkan sesuai amanat konstitusi, dan penguasaan lahan untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk koperasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lain;

- k. Menjadikan tanah sebagai basis usaha pertanian yang harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi;
- l. Menyusun kebijakan peraturan perundang-undangan pertanahan yang menjadi landasan kuat terciptanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pembuktian sertifikat tanah yang sah;
- m. Kebijakan impor oleh pemerintah dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan pokok rakyat, bahan baku dan bahan penunjang untuk industri vital, untuk menjamin kepastian berkurangnya ketergantungan terhadap barang impor secara bertahap, yang diperlukan dalam membangun kapasitas industri nasional yang memanfaatkan potensi dalam negeri;
- n. Menjamin pengakuan negara dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hak ulayat, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

6. Pembangunan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia



Gambar 3.9 Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

Pembangunan bidang hukum menjadi tumpuan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa sebab negara Indonesia merupakan

negara hukum. Segala tindak laku manusia yang hidup di Indonesia harus berdasarkan hukum yang ada. Oleh karena itu, hukum harus dibangun dan ditegakkan dengan sebaik mungkin dengan tanpa pandang bulu karena semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di muka hukum.

Di samping pembangunan bidang hukum, pembangunan bidang Hak Asasi Manusia (HAM) juga tidak kalah penting. Pembangunan nasional haruslah dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap hak-hak dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum dan HAM yang baik adalah pembangunan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Berikut adalah poin-poin pembangunan bidang hukum dan HAM berdasarkan Pancasila:

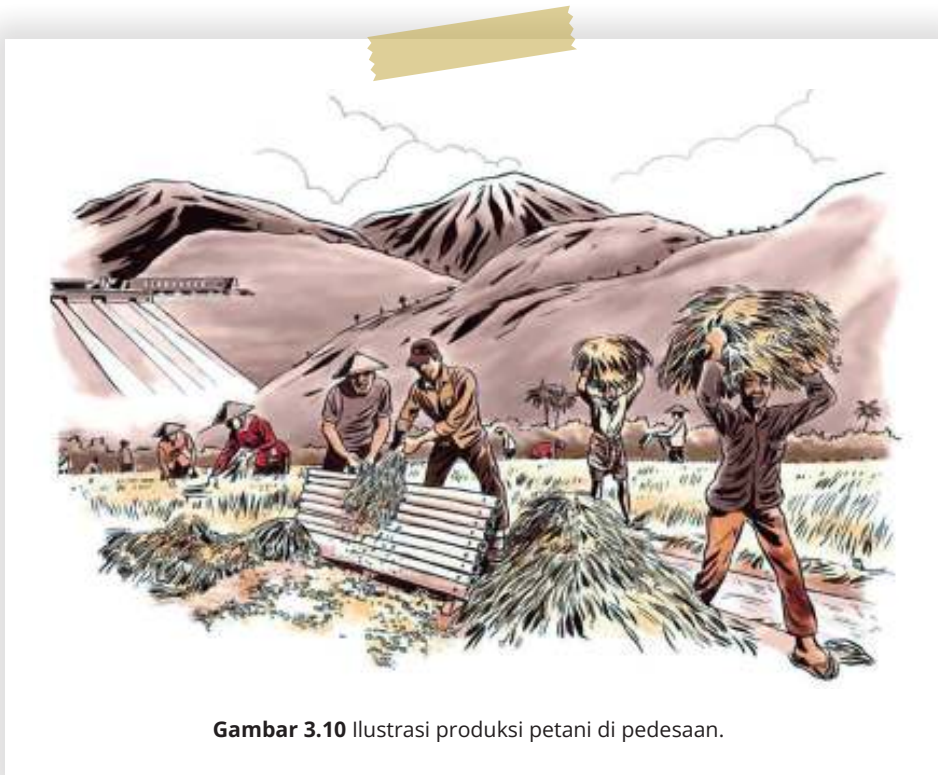
- a. Memperkuat kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penguatan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi harus ditindaklanjuti dengan tindakan di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan dan pengembangan budaya hukum: (1) Di bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pancasila harus dijadikan sebagai batu uji tertinggi materi peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Keberlakuan hukum internasional yang diberlakukan di Indonesia;
- b. Menjadikan Pancasila sebagai pembatas nilai agar keberlakuan hukum internasional tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila;
- c. Menjadikan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu uji dalam melaksanakan sinkronisasi dan uji ulang setiap produk peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- d. Mengembangkan budaya hukum berbasis nilai-nilai Pancasila yang dipedomani semangat nilai gotong royong, berperspektif

gender dan berwawasan lingkungan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;

- e. Memelopori kesadaran bahwa penghormatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi liberal. Sendi-sendi utama Pancasila yang melahirkan Demokrasi Pancasila adalah keadilan, kebajikan dan keutamaan hak. Sendi-sendi itu menjadi landasan untuk membentuk Masyarakat Pancasila yang memuat karakter: berketuhanan, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, tertib, dan aman;
- f. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas;
- g. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara dan menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- h. Mewujudkan pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
- i. Mendorong terlaksananya kepastian hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional;
- j. Meningkatkan kesadaran kepada publik bahwa hak asasi manusia dalam Demokrasi Pancasila adalah hak asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu;

- k. Dalam Demokrasi Pancasila harus dilakukan penyeimbangan antara kepentingan kebebasan individu warga negara dan kepentingan keamanan negara. Justifikasi atas penyeimbangan kepentingan itu adalah negara mempunyai tugas utama, yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Untuk dapat melaksanakan itu, negara melalui aparaturnya harus tetap diberi ruang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) melalui penegakan hukum.

7. Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, SDA, dan Pertanian



Gambar 3.10 Ilustrasi produksi petani di pedesaan.

Rakyat Indonesia haruslah hidup yang layak serta sehat. Hidup yang layak dan sehat salah satunya karena adanya pembangunan dalam bidang lingkungan hidup, sumber daya alam (SDA), serta pertanian. Oleh karena itu, pembangunan bidang ini menjadi penting untuk dilakukan di samping pembangunan-pembangunan bidang lain

yang sudah kalian pelajari dalam sub bab di atas. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA, dan pertanian, maka perlu dirumuskan kebijakan serta peraturan yang bertujuan pada meningkatnya kualitas hidup, SDA, serta pertanian di tanah air. Berikut adalah poin-poin penting dalam melaksanakan pembangunan dalam bidang lingkungan hidup, SDA dan pertanian:

- a. Memastikan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Pengelolaan dan pengaturan keberadaan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Menghadirkan negara sebagai representasi pemilik yang dapat mendayagunakan koperasi, badan-badan usaha milik negara maupun daerah untuk pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan melibatkan, baik pihak swasta nasional maupun asing dapat dilakukan dengan tetap melandaskan pada tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia;
- c. Memastikan keselarasan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup. Negara wajib melakukan harmonisasi antara kepentingan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta menghormati eksistensi masyarakat, pengetahuan dan kearifan lokal;
- d. Menjamin terpenuhinya hak fundamental bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan dirinya berkesempatan mengembangkan diri dalam kehidupan diri sendiri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Negara wajib mengatur pemenuhan hak sekaligus kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara demi kepentingan generasi mendatang sesuai prinsip Pembangunan Berkelanjutan;

- e. Negara menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk menerima dan menempati tanah air Indonesia bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya;
- f. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- g. Menjaga kelestarian tingkat keragaman hayati di Indonesia yang dapat memberi kegunaan bagi ketersediaan bahan-bahan obat-obatan yang berguna bagi umat manusia di dunia;

8. Pembangunan Bidang Transportasi dan Distribusi



Pembangunan bidang transportasi menjadi penting untuk menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Apalagi negara Indonesia yang sangat luas, diperlukan infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan antarwilayah tersebut. Melalui pembangunan bidang transportasi juga akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Dengan begitu, kesenjangan satu daerah

dengan daerah yang lain akan semakin menipis karena mudahnya distribusi barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nilai-nilai Pancasila, tentu harus dijadikan pedoman dasar dalam rangka pembangunan bidang transportasi dan distribusi. Berikut adalah poin-poin dalam melaksanakan pembangunan bidang transportasi dan distribusi berdasarkan Pancasila:

- a. Negara menyelenggarakan sistem transportasi darat, laut dan udara yang semakin mudah dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan pergerakan lintas batas manusia dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Negara menguasai dan menyelenggarakan perhubungan dan angkutan darat, laut dan udara, serta sistem telekomunikasi yang vital;
- c. Membangun infrastruktur transportasi yang dapat menciptakan konektivitas untuk mendukung akses pariwisata, kelancaran arus logistik, akses ke daerah Terluar, Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan (3TP);



Gambar 3.12 Jalan penghubung satu daerah dengan daerah lainnya.

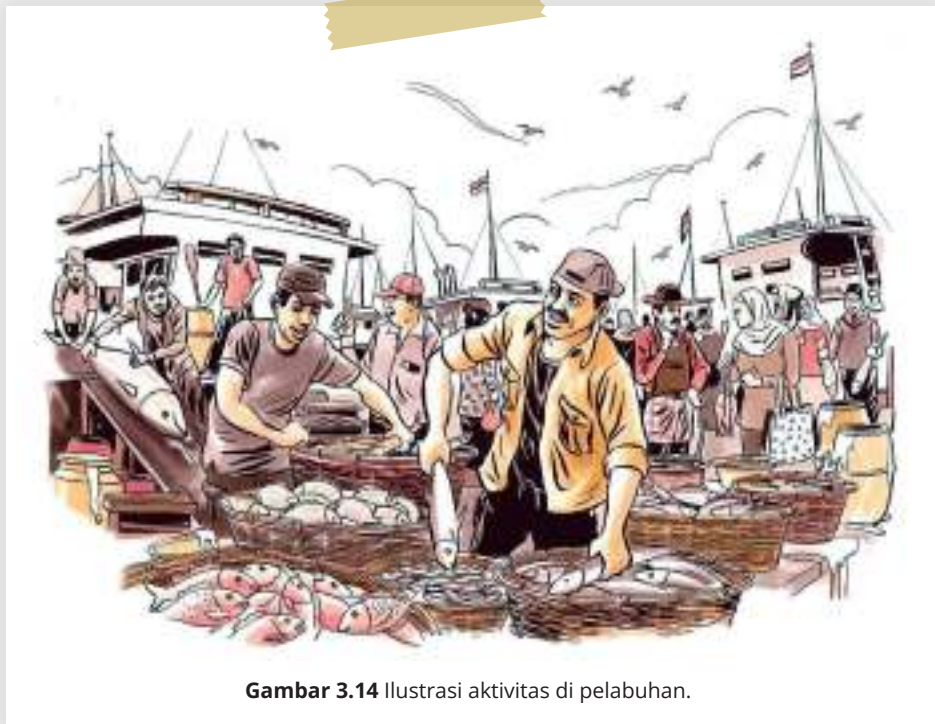
- d. Membangun infrastruktur yang menghubungkan daerah Terluar, Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan yang dapat membuka koneksi antarwilayah, membuka ruang ekonomi baru, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- e. Memastikan bahwa suatu pembangunan infrastruktur transportasi bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat;
- f. Penyelenggaraan tata distribusi oleh Pemerintah berupa barang kebutuhan hidup sehari-hari agar sampai di tangan rakyat dengan cepat, cukup, merata, murah dan aman;



Gambar 3.13 Ilustrasi aktivitas di bandara.

- g. Pengaturan dan penyaluran distribusi oleh Pemerintah berupa bahan penting bagi kehidupan rakyat, dengan mengutamakan keterlibatan koperasi, pemerintah daerah, serta swasta nasional.

9. Pembangunan Bidang Kemaritiman



Gambar 3.14 Ilustrasi aktivitas di pelabuhan.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan di mana luas wilayah Indonesia lebih banyak lautan daripada daratannya. Wilayah Indonesia memiliki luas sekitar 7,81 juta km², di mana 3,25 juta km² adalah lautan, 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan hanya 2,01 juta km² merupakan daratan. Oleh karena itu, pembangunan bidang laut (kemaritiman) menjadi sangat penting karena berkaitan dengan konektivitas antarwilayah di tanah air. Namun tentu pembangunan itu haruslah berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Berikut adalah poin-poin pembangunan dalam bidang kemaritiman berdasarkan Pancasila:

- a. Mendayagunakan dan mengelola kedudukan Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau dan perairan di antara pulau-pulaunya sehingga secara yuridis merupakan negara kepulauan (archipelagic states) yang keberadaannya sudah diakui Konvensi Hukum Laut 1982;

- b. Mengelola dan mendayagunakan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, zona tambahan dan landas kontinen yang mencapai 6.400.000 km² dari total wilayah NKRI seluas 8.300.000 km² atau lebih dari 77% lebih luas wilayah perairan dibandingkan daratan. Panjang garis pantai yang dimiliki lebih dari 108.000 km dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah;
- c. Mengembangkan potensi yang bersumber dari luas perairan, panjang garis pantai dan jumlah pulau yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat memberikan prospek ekonomi yang tinggi yang berasal dari sumber daya alam yang dikandung dan jasa lingkungan yang diberikan;
- d. Membangun kedaulatan yang tangguh atas kawasan laut teritorial dan penegakan hukum yang kuat atas kawasan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen wilayah kepulauan Indonesia;
- e. Mengupayakan penguatan pembangunan maritim dalam hal ekonomi yang dilakukan melalui pembenahan di hulu seperti pembuatan regulasi hingga pembenahan di hilir seperti pembangunan industri dan sistem logistik secara nasional;
- f. Membangun karakter bangsa maritim sebagai bentuk "*reinventing nation*" dari sejarah kejayaan maritim bangsa Indonesia di masa lalu dalam rangka pembangunan di bidang kemaritiman.

10. Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informasi

Kemajuan bidang teknologi komunikasi dan informasi begitu pesatnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak boleh kalah dengan bangsa lain dalam hal pembangunan bidang ini. Pembangunan bidang komunikasi dan informasi menjadi sangat penting untuk dilakukan tentu dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila.



Gambar 3.15 Ilustrasi aktivitas di bandara.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah suatu ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah. Indeks IP-TIK di Indonesia tahun 2020 sebesar 5,59 meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 5.32. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan indeks TIK tertinggi yakni 7,46 sementara, Papua adalah provinsi dengan indeks TIK paling rendah di Indonesia hanya 3,35. Dalam upaya memperkecil gap pembangunan bidang ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan antar wilayah sehingga pada akhirnya, bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa-bangsa maju yang lain di bidang komunikasi dan informasi ini. Berikut ini adalah poin-poin pembangunan bidang komunikasi dan informasi berdasarkan Pancasila:

- a. Negara mengusahakan penguatan sistem komunikasi dan informasi publik, termasuk media dan media sosial sebagai sarana penyadaran dan penggerak rakyat agar menjadi bagian

- dalam penyebaran gagasan, spirit cita-cita, tujuan Pancasila, sekaligus memberi ruang partisipasi rakyat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan;
- b. Negara menyelenggarakan tujuan utama pembangunan bidang komunikasi dan informasi, yaitu (a) Percepatan penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah Indonesia, (b) Percepatan transformasi digital dalam tiga kerangka nasional, yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan (c) Peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik;
 - c. Negara merancang landasan utama, yaitu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menuju digitalisasi nasional, yang dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat;
 - d. Negara memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik serta mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas;
 - e. Negara melaksanakan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - f. Negara memelopori upaya mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, di antaranya pusat data, infrastruktur *cloud* dan identitas digital nasional;
 - g. Hasil pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila harus dapat dinikmati bersama melalui suatu proses distribusi yang berkeadilan dalam aras kemanusiaan. Dalam kerangka itulah pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila harus berakar dalam budaya yang ber-

kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah sebagai aktor utama pembangunan, memberikan arah atau panduan jalannya pembangunan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Negara tidak boleh lagi diam dan tidak peduli terhadap apa yang dialami rakyatnya. Program-program pembangunan yang telah dijanjikan pemerintah menjadi acuan bagi kebijakan dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang.



Ada banyak hal yang telah kita pelajari dalam bab Hakikat Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila ini. *Pertama*, dalam melakukan pembangunan, suatu negara harus mempunyai tumpuan atau pijakan guna menentukan arah pembangunan negara tersebut. Dalam konteks negara Indonesia, yang menjadi dasar pembangunan adalah Pancasila. Pancasila adalah bintang penuntun yang menjadi arah ke mana masa depan bangsa Indonesia ini akan berjalan. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan nasional, semua prosesnya harus berdasarkan Pancasila.

Kedua, pembangunan nasional berdasarkan Pancasila adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang bertumpu pada prinsip atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (a) Berdaulat dalam bidang politik; (b) Berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, (c) Berkepribadian dalam bidang kebudayaan; dan (d) Berasaskan gotong royong. Pembangunan berdasarkan Pancasila bersifat menyeluruh tidak hanya sebatas pembangunan fisik saja seperti pembangunan infrastruktur, jalan raya, bandara, pelabuhan, bendungan dan lain sebagainya. Akan tetapi, pembangunan yang bersifat nonfisik juga dilakukan seperti pembangunan sumber daya manusia, pembangunan bidang pendidikan,

bidang kebudayaan dan lain sebagainya. Hal yang tidak kalah pentingnya seperti pembangunan karakter dan mental bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, sasaran dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dilakukan secara menyeluruh. Artinya, pembangunan nasional yang dilakukan dalam semua bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun bidang atau aspek yang menjadi sasaran dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila antara lain: (1) Bidang pendidikan-kebudayaan, riset dan teknologi; (2) Bidang agama; (3) Bidang pertahanan dan keamanan; (4) Bidang ekonomi; (5) Bidang kesehatan dan kesejahteraan; (6) Bidang hukum dan hak asasi manusia; (7) Bidang lingkungan hidup, SDA dan pertanahan; (8) Bidang transformasi dan distribusi; (9) Bidang kemaritiman; dan (10) Bidang komunikasi dan informasi.

BAB IV

TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami serta melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di bab ini, kalian diharapkan dapat:

1. menguraikan jenis-jenis tantangan pembangunan nasional dari sudut pandang sila-sila Pancasila;
2. membuktikan keberadaan tantangan-tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila yang ada di lingkungan atau daerah tempat tinggal;
3. menganalisa berbagai cara dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional berdasarkan hasil penelitian, berita di media;
4. mengembangkan sikap dan perilaku sebagai warga negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.



Pengantar

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, harus dipertahankan eksistensinya. Pancasila harus kita rawat dan kita jaga. Saat ini kita hidup di era globalisasi. Tantangan yang kita hadapi pasti semakin banyak dan berat. Tantangan itu datang dari berbagai faktor, baik faktor luar (eksternal) maupun faktor dalam (internal). Oleh karena Pancasila sebagai dasar hidup bangsa Indonesia, maka semua kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara harus mampu diterjemahkan dalam segala aspek kehidupan. Termasuk dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan juga tantangan-tantangan yang terjadi di masa yang akan datang. Pancasila harus mampu kita terjemahkan dan kita realisasikan dalam semua bidang, termasuk dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, semua pembangunan yang akan kita lakukan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila

Pada bab ini, kita akan mempelajari tantangan-tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Perlu kita sadari bahwa kita tidak hanya melakukan pembangunan yang bersifat fisik saja. Akan tetapi juga melakukan pembangunan yang bersifat nonfisik seperti pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Sila-sila yang ada di Pancasila harus kita jaga dan rawat eksistensinya. Pancasila, tidak hanya sekedar diucapkan atau dihapalkan akan tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata. Di zaman yang modern seperti saat ini, Pancasila harus terus kita amalkan dalam kehidupan, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara.

Pada era globalisasi, tantangan pembangunan nasional akan semakin berat dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan juga dampak negatif penggunaan teknologi. Kita

harus mempunyai 'pegangan' untuk menentukan arah dan tujuan hidup dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat tersebut. Pancasila hadir sebagai penuntun yang dapat kita jadikan landasan dalam menjalani kehidupan di tengah tantangan kehidupan modern.

Bab ini akan membahas tentang tantangan-tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Secara spesifik kita akan membahas tantangan pembangunan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, tentu tidak akan jauh dari lima sila yang ada pada Pancasila. Secara singkat, tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Tantangan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tantangan sila pertama adalah munculnya radikalisme dan sikap intoleran dalam kehidupan antar umat beragama. Kondisi ini tentu sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja, karena dapat menggoyahkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, radikalisme dan sikap intoleransi menjadi salah satu tantangan yang tidak ringan dalam melakukan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
2. Tantangan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan dari sila kedua ini adalah meningkatnya isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Tantangan yang lebih besar lagi apabila dikaitkan dengan istilah mayoritas dan minoritas. Hal ini akan menguatkan sikap intoleransi antar kelompok yang berbeda. Dengan demikian, isu SARA menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
3. Tantangan sila Persatuan Indonesia. Tantangan sila Persatuan Indonesia ini berupa ancaman terpecah belahnya bangsa Indonesia. Saat ini kita hidup di era media sosial yang sangat mudah sekali untuk terpolarisasi. Salah satu dampak media sosial adalah mudahnya diadu domba, baik secara pribadi maupun antar kelompok atau golongan. Mempertahankan persatuan Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
4. Tantangan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Tantangan pada sila keempat ini

berupa tantangan untuk menjadikan negara kita yang lebih demokratis. Namun, pada kenyataannya selama ini proses-proses demokrasi masih banyak dicerai oleh tindakan-tindakan yang merusak demokrasi. Salah satu contohnya adalah adanya politik uang (*money politic*) pada saat menjalani proses-proses demokrasi seperti pemilihan umum (pemilu) dan lain sebagainya. *Money politic* baik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, korupsi, hingga jual beli jabatan adalah beberapa contoh nyata yang dapat merusak demokrasi.

5. Tantangan sila kelima, yaitu sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan sila kelima ini lebih condong pada masalah ekonomi. Salah satu contoh tantangan sila kelima ini adalah tingkat ketimpangan pendapatan antara penduduk kaya dan penduduk miskin yang masih relatif tinggi. Berdasarkan rasio gini (*gini ratio*), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tingkat ketimpangan Indonesia di angka 0,385 poin. Rasio gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk di suatu wilayah atau negara. Angka 0 adalah tidak timpang sama sekali dan angka 1 adalah timpang sempurna. Ketimpangan pendapatan antarpenduduk merupakan salah satu tantangan dalam rangka menjalankan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Kita akan mempelajari secara lebih detail dan mendalam lagi mengenai tantangan pembangunan berdasarkan lima sila yang ada pada Pancasila. Silakan pelajari materi-materi yang ada di bawah ini untuk mengetahui secara lebih mendalam. Selain itu, kita juga akan mengerjakan beberapa soal sebagai refleksi untuk menguji tingkat pemahaman materi yang ada pada bab ini.



Praktik Pengamalan Pancasila

Meskipun saat ini kita hidup pada zaman modern, tetapi mestinya kita tetap harus bisa atau mampu mempertahankan nilai-nilai yang ada pada jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada pada jati diri bangsa Indonesia tersebut sudah terangkum menjadi inti dari ideologi Pancasila.

Oleh karena itu, meskipun kehidupan modern merupakan suatu hal yang pasti kita hadapi dan tidak bisa kita hindari, tetapi kita tidak boleh lupa terhadap jati diri kita. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia tetap harus kita pertahankan. Kita bisa menjaga dan mengamalkan Pancasila secara sederhana, seperti pada studi kasus yang akan dinarasikan sebagai berikut.

Rian dan Kepedulianya

Rian adalah salah satu siswa kelas XI SMA Negeri 1 Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selain sebagai siswa, ia juga merupakan tutor kursus komputer yang ada di sekolahnya. Rian memang tertarik untuk mempelajari teknologi informasi dan komunikasi sejak lama. Sebelum menjadi tutor kursus komputer, ia telah mengikuti kursus komputer terlebih dahulu dan menamatkan semua tingkatan yang ada di tempat kursusnya. Saat ini Rian menjadi salah satu siswa di sekolahnya yang bisa diandalkan dalam urusan teknologi informasi dan komunikasi.

Meskipun ahli dalam bidang komputer, Rian tidak lantas menjadi lupa dengan panggilan jiwanya. Selain menjadi tutor kursus komputer, Rian juga menjadi pengajar di salah satu Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang ada di desanya. Dia dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun dalam beribadah.

Tidak hanya dalam hal spiritual saja, Rian juga aktif sebagai pengurus organisasi pemuda, yaitu Karang Taruna yang ada di desanya. Ia sering melakukan edukasi seputar literasi teknologi informasi dan komunikasi pada anak-anak yang ada di desa tersebut. Ia juga mengadakan kegiatan rutin di desanya untuk mengedukasi anak-anak supaya tidak kecanduan bermain *game online*.

Dari cerita di atas kita tahu bahwa Rian merupakan salah satu contoh generasi muda yang bisa menghadapi tantangan jaman dengan tetap mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari sosok Rian kita bisa belajar bahwa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, dimulai dari lingkungan tempat tinggal.



Materi Pokok

Pada subbab ini, kita akan membahas materi pokok atau materi inti yang ada pada bab ini. Inti pembahasannya yang ada pada bab ini adalah penjelasan tentang tantangan pembangunan ke depan berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti, pembahasan juga akan mengupas seputar lima sila yang ada pada Pancasila. Dari lima sila tersebut, nanti kita akan mempelajari secara detail apa saja tantangan yang akan kita hadapi kedepannya. Apakah kalian mengetahui tantangan apa saja yang kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang? Mari kita pelajari pembahasan-pembahasan sebagai berikut.

A. Tantangan Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Kita ketahui bersama bahwa sila pertama dalam Pancasila berupa sila Ketuhanan. Sila Ketuhanan dimaknai sebagai sila yang menyiratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia merupakan manusia yang berketuhanan. Manusia yang berketuhanan di sini diartikan sebagai manusia yang mempunyai agama.



Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, agama dan kepercayaan apakah yang dimaksud dalam sila Ketuhanan tersebut? Perlu kita pahami bersama bahwa sila Ketuhanan tersebut bersifat universal dan tidak condong pada salah satu ajaran agama tertentu. Oleh karena Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan, maka Pancasila dihadirkan di atas semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, serta tidak memihak pada salah satunya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia diberi kebebasan hak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai pribadi masing-masing (Pasal 28 UUD 1945). Setiap warga negara berhak untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini sudah diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Tantangan yang kemudian muncul adalah seiring maraknya paham radikalisme pada masyarakat keagamaan. Hal ini tidak hanya terjadi pada satu agama tertentu, tetapi pada semua agama yang ada. Pelaku radikalisme sering menjelekkkan dan menyalahkan kelompok keagamaan tertentu di luar agama yang dianut. Hal ini merupakan salah satu contoh menguatnya radikalisme dalam hal keagamaan.

Oleh karena itu, kita harus mampu mencegah radikalisme umat beragama. Kita seharusnya bisa hidup berdampingan secara damai dan menghormati satu sama lain meskipun mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

B. Tantangan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tantangan pada sila kedua ini berupa menguatnya isu-isu terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Indonesia mempunyai tingkat keberagaman yang sangat tinggi, mulai dari keberagaman dalam agama, suku, ras, hingga antargolongan. Tantangan SARA menjadi persoalan yang tidak mudah, dengan kondisi yang begitu majemuk, memungkinkan terjadinya gesekan antar golongan di Indonesia.

Lebih berat lagi apabila isu SARA ini dikaitkan dengan kondisi politik. Akan sangat mudah menjadi bahan yang bisa membangkitkan isu SARA. Ketika masalah SARA disulut oleh masalah-masalah politik, akan menjadi masalah besar bagi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai hanya karena masalah-masalah kesukuan yang bersifat horizontal, lantas membuat kita bercerai-berai. Kita seharusnya bersyukur telah diberi karunia berupa kondisi bangsa yang sangat beragam yang terdiri atas beratus-ratus suku bangsa, berbagai macam agama dan aliran kepercayaan dan lain sebagainya.



Gambar 4.2 Saling tolong menolong

Sikap tidak mau berbaur dengan kelompok lain yang sebenarnya juga masih dalam satu lingkungan harus kita ubah. Sikap tidak mau berbaur ini akan memunculkan sikap intoleransi ketika ada perbedaan. Dengan demikian, mestinya kita bisa lebih menerima perbedaan yang ada.

C. Tantangan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Pada sila ketiga ini, tantangan yang paling berat ke depannya adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Tantangan kita saat ini adalah hidup di era media sosial. Kita ketahui bersama bahwa

dunia media sosial merupakan dunia liar yang bisa membuat orang mengumbar apa pun yang mereka miliki.

Sayangnya, terkadang apa yang dibagikan di media sosial berupa hal-hal yang bersifat negatif, seperti adu domba, fitnah, saling hujat dan ujaran kebencian, yang berpotensi dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika kita kurang dalam budaya konfirmasi, maka menjadikan kita sering membagikan konten-konten berita yang belum tentu kebenarannya atau bahkan berita bohong (*hoax*).

Bagaimana agar kita tidak terjerat pada putaran berita-berita *hoax*, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya? *Pertama*, kita perlu membiasakan konfirmasi. Sebelum kita ikut serta membagikan berita-berita yang ada di media sosial, coba kita konfirmasi mengenai kebenarannya terlebih dahulu. Apakah berita tersebut benar atau tidak. *Kedua*, coba pikirkan ulang apa manfaat dari membagikan berita tersebut. Apakah dengan membagikan berita tersebut akan ada manfaat yang membawa kebaikan bersama (kemaslahatan) atau tidak. Jika dirasa tidak membawa manfaat, kita tidak perlu ikut serta membagikan berita tersebut.



Gambar 4.3 Stop hoax

Ketiga, mempelajari bagaimana adab dalam bermedia sosial. Hal ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sila kedua sebagaimana yang telah dibahas pada sub pembahasan sebelumnya. Kita perlu mengetahui bagaimana adab yang baik dan yang buruk dalam bermedia sosial.

Dengan mengetahui bagaimana adab dalam bermedia sosial, akan melindungi diri kita menjadi pribadi yang lebih bisa menahan untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, kita juga ikut turut serta dalam menjaga kesatuan Indonesia dengan tidak ikut-ikutan membuat gaduh di media sosial.

D. Tantangan Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pada bagian pengantar bab ini, telah disebutkan bahwa tantangan pada sila keempat ini adalah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dimaknai sebagai tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan demokrasi secara baik dan benar di negeri ini.

Tantangan demokrasi sangat berat, terutama untuk negara-negara berkembang yang belum mempunyai sistem yang kuat. Salah satu contoh tantangan demokrasi yang sangat banyak kita temui terutama saat melaksanakan proses demokrasi berupa pemilihan umum, yaitu *money politic* (politik uang).

Politik uang menjadi salah satu pangkal rusaknya demokrasi di negeri ini. Hak suara dapat dibeli dengan begitu mudah dan murah. Dalam praktik politik uang, politisi berusaha untuk balik modal dari uang rakyat dengan melakukan korupsi. Rakyat sebagai penguasa atas demokrasi menjadi tidak berdaya karena suaranya telah dibeli. Pada akhirnya dalam pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan, kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada rakyat, tetapi berpihak pada kelompok atau golongan pemberi modal untuk membeli suara rakyat saat pemilu.

Hal ini semestinya tidak boleh terjadi di dalam tatanan demokrasi di negeri ini. Namun, pada kenyataannya masih banyak kita jumpai secara nyata praktik politik uang ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, mari mulai untuk mengubahnya. Setidaknya dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jika ada tawaran-tawaran *money politic*, tolak dengan keras, sebab kita harus berpikir untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi.

Tidak hanya itu, jual beli jabatan, korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan juga merupakan praktik-praktik tidak baik yang bisa menjadi tantangan akan terwujudnya demokrasi yang baik. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kalian haruslah bersikap kritis dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang merusak masa depan negeri ini.



Gambar 4.4 Stop money politic

E. Tantangan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tantangan sila kelima berupa tantangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini mencakup dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang penting bagi kehidupan adalah aspek ekonomi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dari aspek ekonomi ini masih terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Dari data ini, 14,34 juta berada di perdesaan, dan 11,82 juta di wilayah perkotaan. Pulau Jawa merupakan daerah penyumbang angka kemiskinan tertinggi dengan angka 13,85 juta orang. Sementara provinsi Kalimantan memiliki jumlah penduduk miskin terkecil yakni sebanyak 980 ribu orang.

Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kelompok masyarakat yang kurang berdaya secara ekonomi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah. Penanggulangan ketimpangan ekonomi dapat dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terencana. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ekonomi seolah menjadi lingkaran tidak berujung dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam mengelola pemberdayaan masyarakat yang sistematis dan terencana, maka kehidupan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang kurang berdaya akan selalu jauh tertinggal dibandingkan dengan kalangan masyarakat pemilik modal.



Gambar 4.5 Potret ketimpangan ekonomi masyarakat perkotaan.

Sumber: Republika/Agung Supri



Refleksi

Silahkan isi kolom jawaban pada tabel berikut sebagai bentuk kegiatan refleksi yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab Tantangan Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila.

No.	Pernyataan Refleksi	Jawaban
1.	Kalian sudah mempelajari tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Menurut kalian, tantangan sila keberapa yang saat ini menjadi tantangan serius yang harus ditangani di era globalisasi dan teknologi informasi? Jelaskan.	
2.	Pada bab di atas ada cerita tentang Rian dan Contoh Keteladannya. Menurut kalian, apakah yang dilakukan oleh Rian merupakan hal terpuji dan patut dicontoh oleh kalian generasi muda. Mengapa? Jelaskan.	
3.	Intoleransi dan radikalisme menjadi tantangan yang dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan agar intoleransi dan radikalisme trendnya bisa menurun, terutama di kalangan anak muda.	

No.	Pernyataan Refleksi	Jawaban
4.	Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, serta agama. Menurut kalian generasi muda, bagaimana cara menjaga keberagaman itu agar Indonesia bisa menjadi bangsa maju seperti bangsa-bangsa maju yang lain.	
5.	Tidak jauh dari tempat tinggal kalian, terdapat banyak anak kecil usia sekolah, tetapi tidak sekolah. Sebagai generasi muda penerus bangsa ini, kegiatan apa yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi fenomena tersebut? jelaskan secara singkat.	

BAB V

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PANCASILA



Capaian Kompetensi

Setelah membaca dan memahami materi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di bab ini, kalian diharapkan akan dapat:

1. menjelaskan makna, sejarah, dan paradigma pembangunan berkelanjutan;
2. menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Pancasila dan sikap hidup bangsa Indonesia;
3. menguraikan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan, baik persoalan sosial, lingkungan, maupun ekonomi yang ada di tanah air ataupun di luar negeri;
4. mengembangkan perilaku hidup sehari-hari yang bisa mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di tanah air.



Pengantar

Pada dua bab sebelumnya, kalian sudah membaca dan mempelajari apa itu hakikat pembangunan nasional serta tantangan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Pada bab berikut ini, kalian akan membaca serta mempelajari mengenai pembangunan berkelanjutan berdasarkan Pancasila. Tentu, kalian telah memahami inti atau sumber nilai dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Namun, pada bab ini, kita akan membahas bentuk pembangunan pada konteks kekinian. Artinya, bentuk pembangunan yang direfleksikan dari pengalaman pembangunan sebelumnya. Meskipun dalam konteks kekinian, model pembangunan ini tetap berpegang pada hakikat pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan belajar pada dinamika pembangunan nasional yang pernah ada maupun yang sedang berlangsung.

Sebagai generasi muda, kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia ini. Baik atau tidak baiknya bangsa Indonesia ke depan, ada di tangan kalian. Sebagai generasi penerus, kalian harus tahu arti penting dari pembangunan berkelanjutan. Mengapa? Karena salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah melindungi generasi saat ini, dan generasi yang akan datang. Jika pembangunan berkelanjutan gagal kita laksanakan, maka generasi kalian akan menghadapi berbagai krisis. Contoh krisis yang mungkin dihadapi antara lain misalnya, kemiskinan yang diderita oleh banyak orang, ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar, krisis air dan udara bersih, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa setiap pelajar punya impian masa depan yang lebih baik dengan berbagai cita-cita yang dimilikinya. Saat ini kalian sudah berada di jenjang SMA/MA/SMK/MAK dan selangkah lagi menuju perguruan tinggi. Cita-cita kalian rasanya semakin dekat. Akan tetapi, impian itu akan sulit terwujud atau bahkan tidak akan terwujud apabila pembangunan berkelanjutan gagal kita laksanakan.

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai proses pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang

dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Proses pembangunan seperti ini dibutuhkan karena di antara berbagai kebutuhan manusia, ada beberapa sumber kebutuhan yang terbatas. Dari kebutuhan yang terbatas tersebut ada yang dapat diperbaharui, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama contohnya penanaman pohon. Selain itu, ada pula sumber kebutuhan yang tidak dapat diperbaharui, contohnya mineral, gas dan minyak bumi. Dengan pembangunan berkelanjutan, sumber-sumber kebutuhan yang terbatas tersebut dijadikan dasar atau pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Mari kita melihat masalah nyata di lingkungan tempat kita tinggal atau di negara kita Indonesia, maupun di dunia yang mengancam perdamaian dan kemakmuran. Kita coba menarik kembali tiga masalah yang sempat dibahas di atas. *Pertama* adalah masalah kemiskinan. Mungkin kalian pernah melihat di media televisi atau internet, anak-anak yang mengalami gizi buruk dan busung lapar karena mereka tidak punya cukup makanan. Jangankan untuk bersekolah seperti kalian, beraktivitas seperti biasa pun sulit mereka lakukan karena kekurangan energi untuk bergerak. Selain itu, beberapa kali juga diberitakan tentang kematian satu keluarga karena kelaparan. Tentu hal tersebut menjadi suatu fenomena yang miris, di tengah banyaknya orang di luar sana yang kelebihan makanan, bahkan sampai membuang-buang makanan.

Kedua adalah masalah ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Tidak jarang banyak dari kita yang sangat memuja orang-orang terkaya di Indonesia maupun dunia. Sementara itu, empati kita kepada orang-orang miskin semakin berkurang. Padahal sebagai pelajar atau kaum terdidik, kita harusnya sadar bahwa mungkin ada ketidakadilan di sana. Mungkin ada ketimpangan dalam akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Mengapa sumber ekonomi hanya dinikmati atau dikuasai oleh segelintir orang saja? Sementara yang lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses sumber ekonomi yang ada.

Ketiga, masalah lingkungan. Banyak sekali isu lingkungan yang kita hadapi. Sebagai contoh, hutan semakin gundul yang menyebabkan banjir

dan tanah longsor; sampah plastik mencemari air laut yang menyebabkan hewan di dalamnya mati, lalu manusia yang mengonsumsi hewan laut juga ikut memakan sampah plastik dalam bentuk mikro plastik; udara tercemari oleh emisi karbon yang menyebabkan penyakit pada tubuh manusia; serta permukaan air laut meningkat dan mengancam menenggelamkan pulau-pulau kecil yang juga berpenghuni.

Berdasarkan kompleksnya persoalan di atas, tentu saja kita tahu bahwa hal tersebut terjadi akibat perilaku manusia yang tidak bijak. Manusia sendirilah yang menjadi penyebab dari masalah yang tengah dihadapinya. Persoalannya adalah masalah tersebut mungkin tidak hanya berlaku pada generasi saat ini. Generasi berikutnya berpotensi menanggung masalah yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Lantas bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Poin penting yang perlu disadari adalah bahwa hal tersebut tidak cukup ditangani secara teknis semata, melainkan membutuhkan landasan ideologis yang kuat untuk merespon dan merancang kebijakan yang dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam konteks ini Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan sumber nilai dalam merespon dan merancang kebijakan yang dapat mengatasi persoalan-persoalan pembangunan berkelanjutan.

Pada bab ini kita akan mempelajari dan membahas bagaimana nilai dan spirit Pancasila diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan. Dan bagaimana pentingnya sila-sila Pancasila dalam mempengaruhi bentuk-bentuk solusi konkret atas persoalan yang bangsa Indonesia hadapi. Selain itu, kalian akan belajar tentang latar belakang pembangunan berkelanjutan, tentang bagaimana pentingnya pembangunan berkelanjutan serta hal-hal yang mendasarinya. Tentu kalian juga akan mempelajari tentang bagaimana paradigma pembangunan berkelanjutan dengan cara pandang atau perspektif yang perlu dimiliki dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan tersebut. Terakhir, kalian akan belajar dari universalitas dan partikularisme pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, kita fokus pada bentuk dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Materi yang dibahas di antaranya yaitu

mengapa hal ini relevan, dalam bentuk apa pembangunan berkelanjutan diterapkan di Indonesia, serta apa saja tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, kita akan masuk pada pembahasan tentang sumbangsih yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam pembangunan berkelanjutan. Tema pada bab ini adalah contoh pembangunan berkelanjutan oleh pelajar.



Praktik Pengalaman Pancasila

Terdapat tiga misi utama yang ingin diwujudkan dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). *Pertama* adalah menurunkan angka kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem yang terjadi di beberapa bagian dunia. Pada kemiskinan ekstrem ini, kebutuhan pokok manusia seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi menjadi langka atau sulit untuk didapatkan. *Kedua* adalah menghapuskan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Tujuannya adalah mencapai pemerataan ekonomi dalam masyarakat sehingga semua orang dapat hidup dengan adil dan makmur. *Ketiga* adalah menjaga alam atau keseimbangan lingkungan termasuk hewan di dalamnya. Hal ini bertujuan agar kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam selalu seimbang.



Gambar 5.1 Infografik tiga misi utama pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini beberapa gambaran pengamalan yang dapat kita lakukan untuk mendukung dan mengusahakan pembangunan berkelanjutan:

A. Keharmonisan Masyarakat Adat dan Lingkungan

Berbeda dengan hiruk pikuk kehidupan perkotaan, masyarakat adat tinggal dekat dengan alam yang asri nan tenang. Mereka menjaga keseimbangan dan relasi yang harmonis dengan alam. Ketika alam terjaga keseimbangannya, alam akan memberikan perlindungan serta berbagai sumber penghidupan yang berlimpah. Mulai dari air, oksigen atau udara bersih yang berlimpah, padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan tumbuh subur, dan lain sebagainya.

Apakah kalian pernah mendengar masyarakat adat Kajang atau suku Kajang di Sulawesi Selatan? Masyarakat yang identik dengan baju hitam ini bermukim di hutan daerah pedalaman Kabupaten Bulukumba. Mereka terbagi ke dalam dua wilayah pemukiman. Kajang dalam masih sangat menjaga adat istiadat mereka dan tidak tersentuh oleh kehidupan luar. Sementara, Kajang luar yang mulai membuka diri dan menerima pengaruh kehidupan luar, tetapi tetap mempertahankan sebagian adat istiadat.



Gambar 5.2 Potret keseharian masyarakat Kajang.

Sumber: beritalingkungan.com

Masyarakat adat Kajang dalam kehidupan sehari-hari, memegang prinsip bahwa keberadaan lingkungan sama pentingnya dengan keberadaan manusia. Dengan demikian, manusia tidak boleh mendominasi apalagi mengeksploitasi alam. Mereka percaya bahwa lingkungan memiliki sistem kehidupan sendiri. Jika lingkungan diusik secara berlebihan oleh manusia, maka alam akan mengirimkan pesan melalui berbagai bencana alam. Mereka percaya bahwa ketamakan dengan mengambil apa yang dimiliki alam secara berlebihan, akan mendatangkan hukuman dalam berbagai bentuk. Selain itu, orang Kajang tidak menggali sumur, karena hal itu diyakini sebagai tindakan menyakiti bumi. Mereka mengambil air untuk kebutuhan hidup melalui mata air maupun sungai di sekitar mereka.

Hukum adat adalah pandangan hidup yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Kajang. Mereka menyebutnya *Pasang Rikajang*. *Pasang Rikajang* mengandung etika dan norma kehidupan yang berkaitan dengan perilaku sosial, lingkungan dan alam sekitar. Meskipun tidak dituliskan, cara hidup bijaksana oleh suku Kajang diwariskan secara lisan dan praktik dalam keseharian mereka.

Sesuai dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, suku Kajang telah mencontohkan bahwa kita yang mengaku sebagai makhluk bertuhan harusnya menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan. Mengambil secukupnya dari alam, tidak merusak apalagi mengeksploitasi. Mengeksploitasi artinya mengambil kekayaan alam secara berlebihan untuk memaksimalkan keuntungan manusia. Ketuhanan yang welas asih tidak hanya kita tujukan kepada sesama manusia, melainkan juga kepada tumbuhan dan segala isi yang ada di alam. Kita sering kali mengaku bertuhan, tetapi tidak mampu menjaga keseimbangan antara hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan alam sekitar.

Jika kita telusuri lebih jauh, setiap agama dan kepercayaan mengajarkan hal yang sama namun dengan bahasa dan gambaran yang berbeda-beda. Sifat merusak dan tamak selalu digambarkan sebagai sesuatu yang buruk oleh semua agama dan keyakinan. Oleh karena itu, manusia diberi petunjuk bagaimana memiliki sifat membangun dan rasa syukur untuk hidup secukupnya di dunia ini.

B. Perilaku Adil dan Beradab terhadap Manusia dan Lingkungan

Sikap adil dijadikan salah satu fondasi penting sejak awal berdirinya negara kita Indonesia. Sikap adil disebutkan sampai dua kali dalam Pancasila. Selain itu, kata adil juga disebutkan lima kali dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Bersumber dari dua landasan tersebut, hukum dan aturan lainnya di Indonesia harus berlandaskan keadilan. Adil yang dimaksud adalah adil yang dilengkapi dengan adab karena sebuah masyarakat yang beradab telah maju sifat dan perilakunya. Sebuah pepatah bijak mengatakan, "Tegakkan keadilan meski langit akan runtuh, jaga adab karena itulah yang membedakan kita dengan binatang". Ada etika dan nilai-nilai baik di dalam pepatah bijak ini. Mari kita lihat gambaran contoh narasi di bawah ini.

Seorang perempuan bernama Winta, memiliki restoran nasi goreng yang sangat laris. Dia mempekerjakan 20 karyawan yang sudah diatur tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Perilaku adil yang dilakukan oleh Winta adalah membayarkan gaji para karyawan sesuai dengan upah yang layak. Karyawan bekerja tidak lebih dari jam yang telah disepakati atau memberikan uang lembur jika ada pekerjaan tambahan. Ia juga tidak membebani pekerja lebih dari tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus sebagai penghargaan atas kerja keras para karyawannya.

Terdapat satu hal penting yang seringkali terlupakan. Adil dan beradab di dalam Pancasila sebenarnya mengajarkan bahwa jika keuntungan dan taraf hidup Winta beserta keluarganya semakin meningkat dari hasil penjualan nasi goreng, maka selayaknya taraf hidup para karyawan juga ikut meningkat. Winta tidak harus selalu berpatokan pada upah minimum kerja yang diberikan kepada karyawan. Ada semangat dan kesetaraan bahwa tidak hanya pemilik usaha yang berhak hidup layak, para pekerja juga memiliki hak yang sama untuk hidup layak sebagai hasil jerih payahnya dalam bekerja. Hal ini karena antara Winta dan pekerjanya sama-sama saling membutuhkan.

Selanjutnya kita beralih pada contoh adil dan beradab terhadap lingkungan. Ada sebuah novel yang sangat menarik berjudul “Dunia Anna”.

Dunia Anna

Novel ini menceritakan tentang seorang pelajar perempuan bernama Anna yang berusia 16 tahun. Dia bertemu dengan cicitnya bernama Nova di dalam mimpi yang hidup di masa depan, tepatnya tahun 2082. Di dalam mimpi itu, cicitnya marah kepada Anna karena Nova hidup di bumi yang sakit akibat ulah Anna dan generasinya yang tidak menjaga bumi. Banyak hewan yang sudah punah karena habitat mereka dirusak oleh manusia. Nova hanya bisa melihat mereka melalui video-video di museum. Karbondioksida telah memenuhi atmosfer sehingga pemanasan global terjadi. Es raksasa di kutub utara mencair dan permukaan air laut meningkat. Beberapa daratan yang berpenghuni ikut tenggelam.

Mimpi dan dunia fantasi Anna yang bertemu cicitnya terus berlanjut dan cukup mengganggu keseharian Anna sebagai pelajar. Bahkan setiap kali terbangun dari mimpi, Anna ingat secara detail apa yang terjadi dalam mimpinya. Bagaimana dua generasi setelahnya menuntut haknya untuk hidup layak dengan air dan udara yang bersih serta cuaca dan iklim yang stabil. Dari mimpi itu, Anna menjadi gelisah dan sangat prihatin dengan isu lingkungan seperti pemanasan global. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hingga akhirnya, Anna bertemu seorang dokter yang bernama Benjamin. Dia berkata kepada Anna bahwa sebenarnya tidak ada obat yang dapat menyembuhkan seorang anak muda yang memiliki perhatian lebih terhadap pemanasan global selain mendirikan organisasi pecinta lingkungan di sekolahnya.

Bisakah kamu bayangkan apa yang dilakukan oleh organisasi pecinta lingkungan di sekolah? Tentu saja aktivitas dan program mereka tidak harus terbatas pada ruang lingkup sekolah saja. Misalnya, mereka bersatu

menanam pohon di bukit yang mulai gundul akibat penebangan pohon secara liar, membersihkan sampah yang berserakan di sepanjang bibir pantai, membuat pupuk organik dari sampah basah dan lain sebagainya. Adil dan beradab kepada sesama manusia dan lingkungan ternyata sangat dekat dengan kehidupan remaja seperti kalian. Bukan konsep dan pemikiran yang abstrak untuk dijangkau oleh akal dan imajinasi setiap remaja. Kepekaan dan kepedulian menjadi syarat bagaimana remaja mampu berlaku adil dan beradab terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

C. Kesatuan Manusia dan Alam yang Tidak Dapat Dipisahkan

Saat menyebut tanah air Indonesia, apa yang ada dalam imajinasi kalian? Sama halnya ketika menyanyikan lagu “Rayuan Pulau Kelapa”. Apa yang kalian rasakan?



Lagu tersebut menggambarkan bagaimana kesatuan manusia dan tanah kelahiran atau tempat tinggalnya. Jika tanah air ini rusak atau bahkan tidak ada, maka dapat dipastikan bangsa Indonesia dan kita semua yang ada di dalamnya juga tidak ada.

Saat Sukarno berpidato pada 1 Juni 1945, beliau menyampaikan satu pertanyaan, apakah yang dinamakan bangsa? Apa syaratnya? Ernest Renan dan Otto Bauer, tokoh pemikir dari Barat pernah mengatakan bahwa syarat suatu bangsa adalah kehendak untuk bersatu dikarenakan persamaan nasib. Namun, Sukarno berkata bahwa itu saja tidak cukup karena ada satu hal penting yang sempat luput dari konsep bangsa, yakni tanah air. Ada satu kesatuan antara manusia dan alam tempat mereka lahir, berpijak dan bernaung. Alam mempengaruhi cara hidup dan cara pandang. Alam juga sangat erat kaitannya dengan identitas budaya seseorang, seperti dialek atau bahasa, warna kulit, model rambut, makanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan di atas, sudah semestinya alam ditempatkan setara dan sama mulianya dengan manusia di muka bumi ini. Saat masa penjajahan, alam atau wilayah teritorial Indonesia dipertahankan dengan pengorbanan nyawa para pahlawan. Dengan menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar berarti kita juga sedang menjaga kemakmuran dan kedaulatan Indonesia.

D. Keadilan Sosial sebagai Cita-Cita Khidmat Bangsa

Keadilan yang sedang kita upayakan bersama adalah keadilan untuk hidup layak dan terlepas dari kemiskinan, keadilan untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak dan keadilan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ketiga hal itu menjadi indikator dasar dalam indeks pembangunan manusia untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memberikan bantuan bagi para siswa kurang mampu untuk mengusahakan akses pendidikan yang layak. Misalnya, Kartu Indonesia Pintar bagi siswa tingkatan SD sampai SMA sederajat dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sebelumnya dinamakan Beasiswa Bidik

Misi untuk tingkatan strata satu perguruan tinggi. Jika ingin melanjutkan pendidikan tinggi sampai S2 (master) dan S3 (doktor), mahasiswa kurang mampu atau yang berasal dari daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal, dapat memanfaatkan beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Selain itu, pemerintah membuka beasiswa LPDP khusus untuk Indonesia bagian Timur, yakni Papua dan Papua Barat. Ketimpangan kualitas pendidikan yang nyata, mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini disambut baik dan menjadi harapan baru bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Mereka dapat sekolah hingga kuliah tanpa harus membebani orang tua. Dengan memiliki bekal pendidikan yang layak, harapannya mereka dapat mengubah kehidupan ekonomi keluarga. Juga diharapkan dapat membawa perubahan yang baik bagi masyarakat di daerah tempat tinggalnya.

Keadilan untuk Semua

Satu kisah inspiratif datang dari Raeni seorang anak tukang becak yang mampu menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang menggunakan Beasiswa Bidik Misi. Pada hari wisudanya, dengan bangga dia diantarkan oleh bapaknya menggunakan becak. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari mengayuh becak sehari-hari, sepertinya tidak mungkin Raeni dapat mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi. Namun, dengan adanya bentuk perhatian pemerintah akan pemerataan akses pendidikan, Raeni dapat menikmati keistimewaan mengenyam pendidikan tinggi.

Lepas dari pendidikan strata satu, Raeni kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan master dan doktor di Inggris. Dia diamanahkan untuk mengasah kemampuan diri di negeri seberang hingga jenjang S3, lalu kembali ke tanah air mengabdikan ilmunya. Studi di luar negeri memerlukan biaya yang sangat besar. Nominal ini bahkan sulit dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Kita patut bersyukur dan bangga karena anak daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Inilah gambaran upaya mewujudkan cita-cita keadilan sosial melalui jalur pendidikan. Sumber dana pendidikan yang digunakan salah satunya bersumber dari keuntungan kekayaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara atau badan usaha milik negara. Apa yang disediakan alam dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat. Bukan hanya untuk memperkaya segelintir orang yang memiliki modal semata.



Materi Pokok

A. Latar Belakang Pembangunan Berkelanjutan

Seperti yang telah disampaikan pada bagian pengantar bab, pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* berusaha memastikan agar manusia saat ini dapat memenuhi kebutuhannya dengan mempertimbangkan generasi selanjutnya untuk tetap mendapatkan haknya untuk hidup layak dan mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika kita renungkan, pembangunan berkelanjutan mengajak kita untuk hidup lebih bijak. Apakah kalian sempat berpikir asal muasal dari konsep pembangunan berkelanjutan ini?

Dapat dikatakan bahwa embrio dari pembangunan berkelanjutan berasal dari Konferensi Mengenai Lingkungan Manusia atau *Conference on the Human Environment* yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972 di Stockholm. Dari konferensi tersebut, PBB melalui Konferensi Dunia Mengenai Lingkungan dan Pembangunan atau *World Conference on Environment and Development*, memublikasikan sebuah laporan pada tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future* atau Masa Depan Kita Bersama. Laporan tersebut memuat konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup tiga aspek, yakni pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan alam. Dibutuhkan landasan tata kelola untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan dilanjutkan dengan pertemuan Konferensi Bumi PBB atau *United Nations Earth Summit* pada tahun 1992 bertempat

di Rio De Janeiro. Pertemuan ini menghasilkan agenda 21 dan sebuah dokumen berjudul Masa Depan yang Kita Inginkan atau *Our Want Future*.



Sederhananya, pembangunan berkelanjutan melihat adanya ancaman kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Saat itu, sumber daya alam dikeruk tanpa batas dengan dalih memenuhi kebutuhan manusia. Meningkatnya jumlah penduduk semakin menambah potensi kerusakan lingkungan. Hal ini karena jumlah kebutuhan manusia semakin bertambah, diiringi meningkatnya gaya hidup yang hedonisme. Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan jumlah konsumsi daging, padahal gas metana yang dihasilkan oleh rumah ternak menyumbang 14,5% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Gaya hidup keliling dunia (traveling) menjadi satu kebutuhan tersier masyarakat kalangan menengah ke atas yang berkonsekuensi pada kebutuhan perjalanan jauh menggunakan pesawat. Sementara

perjalanan pesawat meninggalkan jejak karbon di udara. Bumi memiliki keterbatasan menampung karbondioksida. Ketika manusia meninggalkan jejak karbon terlalu banyak, maka generasi setelahnya harus melakukan pengurangan karbon secara ekstrem.

Berangkat dari kegelisahan terhadap kondisi lingkungan yang dibawa ke berbagai forum dunia sejak tahun 1972, barulah pada tanggal 25 September 2015 bertempat di New York, 193 negara termasuk Indonesia mendeklarasikan dan menyepakati pembangunan berkelanjutan.



Gambar 5.4 Infografik tiga aspek Pembangunan Berkelanjutan.

Ada tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dan menimbulkan hubungan sebab akibat, yakni aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil. Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan. Demikian pula hubungan antara sosial dan lingkungan dimaksudkan agar dapat terus bertahan. Ketiganya harus seimbang dengan porsi masing-masing.

Perlu diketahui bahwa sebelum agenda pembangunan berkelanjutan dibuat, telah ada tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. Tujuan pembangunan milenium adalah ingin mengentaskan kemiskinan di dunia pada tahun 2015. Sayangnya, hingga 2015, kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia. Sementara sumber daya alam tidak hentinya dikeruk. Parahnya lagi, tidak ada regulasi tertentu dalam pengambilan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan dua kerugian, yakni kemiskinan tidak teratasi dan lingkungan semakin terancam. Untuk itulah, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menggantikan pembangunan milenium pada tahun 2015 dan menargetkan dapat mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2030 nanti.

Nah, menurut kalian apakah misi pembangunan berkelanjutan akan gagal seperti pembangunan milenium? Atau justru akan berhasil di tangan para pemuda seperti kalian? Jawabannya dimulai dari seberapa peka kalian terhadap isu sosial, ekonomi dan lingkungan yang ada di sekitarmu.



Gambar 5.5 Infografik Delapan Poin Millennium Development Goals

B. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Telah disebutkan di atas, bahwa ada yang keliru dengan pembangunan konvensional yang selama ini digunakan tidak terkecuali di Indonesia. Untuk itu, kita perlu merombak paradigma pembangunan konvensional menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan. Menurut Prof. Emil Salim, seorang putra bangsa yang aktif mewakili Indonesia di PBB untuk pembangunan berkelanjutan, ada lima perubahan mendasar yang perlu kita lakukan dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengubah Perspektif Jangka Pendek Menjadi Jangka Panjang

Jika sebelumnya kita terburu-buru dalam mengejar keuntungan dengan mengeksploitasi alam secara intensif, maka kita harus beralih ke praktik mengelola sumber daya alam dalam jangka waktu yang panjang. Hal itu bisa terwujud dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan utama manusia yang bersumber dari alam dapat diukur dan ditentukan kadarnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan utama, bukan untuk memenuhi hawa nafsu dan keinginan bersenang-senang semata.

Sebagai contoh, pohon yang ada di hutan ditebang secara masif lalu kayunya diekspor. Di satu pihak, keuntungan yang didapat mungkin banyak dalam waktu yang cepat. Akan tetapi, keuntungan tersebut tidak bertahan lama. Sementara di lain pihak, butuh waktu belasan hingga puluhan tahun untuk menanam kembali pohon hingga tumbuh besar dan kokoh. Jika memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada banyak potensi di dalam hutan seperti keindahan alam, manfaat tumbuhan dan mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan, tanpa harus menggunduli hutan.

Seorang pemuda di Sumatera Barat bernama Ritno Kurniawan mendapat penghargaan atas jasanya mencegah pembalakan liar di hutan. Dia mendampingi dan melibatkan warga sekitar untuk mengelola ekowisata air terjun Ngarai. Dia mampu menangkap

potensi lain di dalam hutan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat di sana. Langkah kecil ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi alam dan manusia.

2. Aspek Ekonomi Sejajar dengan Aspek Sosial dan Lingkungan

Poin ini telah kita bahas beberapa kali pada pemaparan sebelumnya, namun tetap perlu untuk kembali ditekankan karena menjadi pusat atau wajah utama dari pembangunan berkelanjutan. Kalian tentu sudah tahu bahwa peningkatan jumlah penduduk juga menuntut penambahan lahan untuk terpenuhinya kebutuhan makanan, pekerjaan, infrastruktur dan perumahan. Pembukaan lahan dalam jumlah berlebihan sudah pasti merusak alam dan mengganggu ekosistem yang sebelumnya ada di lahan tersebut.

Kembali lagi ke pemanasan global, terdapat tiga pulau kecil yang berpenghuni di Samudra Pasifik, yaitu Marshall, Kiribati, dan Vanuatu yang terancam tenggelam seluruhnya. Saat permukaan air laut meningkat dan menenggelamkan sebagian dari pulau itu, penduduknya terpaksa menjadi pengungsi musiman ke pulau terdekat yang lebih aman. Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, penduduk di pulau-pulau tersebut telah mempersiapkan diri untuk mengasah keterampilan yang akan digunakan saat mereka harus menjadi imigran di negara lain akibat tenggelamnya pulau mereka. Tentu saja kita tidak ingin hal itu juga terjadi di Indonesia yang negaranya terdiri dari pulau-pulau. Sebuah penelitian dari geodesi ITB, 95 % daerah Jakarta terancam akan tenggelam di tahun 2050.

Berdasarkan uraian permasalahan lingkungan di atas, sudah seharusnya pembangunan ekonomi ditempatkan sejajar dengan pembangunan sosial dan perlindungan alam. Tidak ada jalan atau alternatif lain yang dapat kita tempuh selain menjaga keseimbangan ketiganya.

3. Kepentingan Publik Ditempatkan di Atas Kepentingan Pribadi

Sering kali kepentingan individu yang memiliki modal dan daya beli lebih besar mengalahkan kepentingan publik. Misalnya ruang publik

harus digusur demi mendirikan bangunan komersial untuk bisnis yang hanya dikuasai segelintir orang saja. Contoh lainnya, para petani yang berusaha mempertahankan lahannya dari upaya pembebasan lahan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sawit besar, akan tetapi upaya mereka tidak berhasil. Tak jarang, terdapat beberapa kasus yang malah membuat para petani ini harus mendekam di penjara dengan tuduhan provokasi dan melakukan perlawanan atau kekerasan. Terkadang, pihak-pihak yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tersisih oleh pihak yang berusaha menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya.

4. Kerugian Sosial dan Lingkungan yang Harus Dibayar

Selama ini, harga yang harus dibayarkan oleh perusahaan/korporasi yang mengeruk sumber daya alam, belum memasukkan biaya kerugian sosial dan lingkungan. Padahal, dalam sebuah aktivitas ekonomi seperti pertambangan misalnya, biaya konflik sosial akibat adanya kecemburuan atau ketimpangan ekonomi merupakan sebuah harga mahal yang harus masuk di dalam perhitungan. Lebih dari itu, menipisnya sumber daya alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat memperburuk kesehatan manusia, semestinya juga dihitung sebagai harga yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Selama ini, kerugian-kerugian tersebut dianggap bagian dari biaya eksternal yang tidak perlu dibayarkan kepada pemerintah atau masyarakat sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan ini. Ke depannya, biaya konflik sosial dan kerusakan lingkungan semestinya masuk ke dalam pertanggungjawaban sebuah aktivitas industri.

5. Perbaikan Dimulai dari Kritik Diri dan Kemandirian Pemerintah

Pemerintah harus terbuka dan kritis melihat kenyataan yang ada. Tindakan bijak yang diharapkan dari pemerintah adalah tidak adanya kolusi dengan korporasi/perusahaan. Justru, pemerintah dapat melibatkan korporasi dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.



Gambar 5.6 Infografik 5 poin perubahan mendasar dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan.

C. Universalitas dan Partikularisme Pembangunan Berkelanjutan

Masih ingatkah kamu pembahasan pada latar belakang pembangunan berkelanjutan? Pada bagian tersebut diceritakan bagaimana pembangunan berkelanjutan bertransformasi melalui perjalanan panjang dari Stockholm ke New York. Pembangunan berkelanjutan dibawa dari satu forum ke forum yang lain. Pihak-pihak yang merumuskannya berasal dari berbagai perwakilan negara termasuk perwakilan Indonesia.

Berangkat dari akar permasalahan yang sama, dunia perlu menyatukan suara dan berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, PBB mendorong agar pembangunan berkelanjutan dilakukan di seluruh dunia secara serentak dengan target akan tercapai sebelum tahun 2030.

Satu slogan umum yang biasa digunakan dalam pembangunan berkelanjutan adalah *no one left behind* atau tidak ada seorang pun yang tertinggal di belakang. Semua berhak hidup layak dan bahagia. Ban Ki-moon, sekretaris PBB saat itu mengatakan bahwa agenda ini adalah tugas atau pekerjaan rumah seluruh masyarakat di muka bumi serta akan menjadi rencana kerja yang jelas dan terukur menuju kesuksesan global. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan memiliki nilai-nilai universal/dunia yang menjadi acuan masyarakat dunia di mana pun berada. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan mesti bersandar pada nilai-nilai universal yang ada? Bagaimana dengan ideologi atau dasar negara yang dimiliki oleh masing-masing negara?

Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru di muka bumi ini. Pada dasarnya akar dari pembangunan berkelanjutan telah ada di masing-masing negara, atau bahkan telah dipraktikkan sejak dahulu oleh suku Kajang pada pembahasan di atas. Selain itu, para perwakilan negara yang ikut bersama merumuskan pembangunan berkelanjutan juga menyadari bahwa apa yang dituju oleh pembangunan berkelanjutan, juga merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup di negara kita.

Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia ternyata tidak bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan, melainkan selaras dan saling menguatkan. Contoh pengamalannya telah kita bahas sebelumnya. Pancasila juga mencerminkan nilai-nilai universal. Dalam hal ini, dapat dilihat dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Terlihat bahwa Pancasila penting dalam

pembangunan berkelanjutan. Mengapa? Jawabannya karena Pancasila lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Pancasila hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sumber ideologi dan konstitusi tidak boleh ditinggalkan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Pancasila menjadi sumber spirit dalam mewujudkan setiap program yang diadakan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, keberadaan dan fungsi negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan juga sangat penting. Hal ini karena negara memiliki peran strategis untuk menyampaikan tujuan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat. Namun demikian, nilai-nilai universal yang dimiliki oleh pembangunan berkelanjutan perlu dimaknai ulang oleh masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya dari tiga prinsip utama yang ingin dicapai, yakni mengentaskan kemiskinan, menghapuskan kesenjangan dan melindungi lingkungan, prioritas masing-masing negara sangat tergantung pada kondisi mereka. Artinya, titik berangkat masing-masing negara dapat berbeda.

Kolaborasi antara prinsip yang dicetuskan oleh pembangunan berkelanjutan dengan Pancasila niscaya dibutuhkan. Begitu pula kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga perangkat desa yang sekilas akan dibahas di bawah ini.

D. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Sama dengan negara lain yang berkomitmen mengusahakan pembangunan berkelanjutan, Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal

dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tujuh belas tujuan di atas diwujudkan dalam berbagai program yang akan disusun bersama. Untuk itu, dibutuhkan landasan dasar seperti undang-undang atau peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan kepala daerah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelaksanaan TPB ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui kementerian dan pemerintah daerah serta ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Undang-undang tentang TPB ini saling menguatkan dengan undang-undang yang lain sesuai dengan tujuan yang ada dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya, dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Keterangan simbol tujuan

1.	Tanpa kemiskinan
2.	Tanpa ketaparan
3.	Kehidupan sehat dan sejahtera
4.	Pendidikan berkualitas
5.	Mencapai kesetaraan gender
6.	Air bersih dan sanitasi layak
7.	Energi bersih dan terjangkau
8.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9.	Industri, inovasi dan infrastruktur
10.	Berkurangnya kesenjangan
11.	Kota dan permukiman yang berkelanjutan
12.	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13.	Penanganan perubahan iklim
14.	Ekosistem lautan
15.	Ekosistem daratan
16.	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan tangguh
17.	Kemitraan global

* Tujuan disingkat tanpa mengurangi arti tujuan sesungguhnya

Gambar 5.7 Infografik 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sumber: sdgs.un.org/goals

Sebelum penetapan UU No. 59 Tahun 2017, Indonesia sebetulnya telah bersiap untuk menyambut agenda pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan pada tahun 2015 di Stockholm. Kesiapan itu ditandai dengan usaha keras untuk mempercepat pengimplementasian pembangunan berkelanjutan. Kerja keras tersebut dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2009-2014), Armida Salsiah Alisjahbana, dibantu oleh Endah Murniningtyas sebagai Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2010-2016). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia dipercayakan oleh PBB untuk menjadi panitia yang memberi masukan tentang agenda pembangunan global pasca-2015. Momen ini juga menjadi cikal bakal peralihan pembangunan milenium ke pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pada tahun 2016, Prof. Emil Salim dan tim mewakili Indonesia diundang oleh PBB sebagai bentuk penghargaan atas gagasan mereka yang termasuk dalam enam gagasan terbaik tentang pembangunan berkelanjutan. Prof. Emil Salim dan tim juga bertemu dengan para donatur yang akan mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dari gambaran keterlibatan dan usaha yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan semakin menguatkan bahwa agenda ini secara serius diupayakan di Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah memfasilitasi perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) pembangunan berkelanjutan tahun 2020-2024. Pihak yang terlibat di dalamnya adalah pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Dengan menggunakan prinsip inklusif atau terbuka, RAN Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan dengan beberapa prioritas pembangunan, seperti fokus pembangunan pada daerah 3T dan model pembangunan *bottom-up* atau dari bawah ke atas.

1. Fokus Pembangunan Daerah 3T

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditandai dengan fokus pembangunan yang mulai dipusatkan dari pinggir atau daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Pemerintah

menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan sebelumnya lebih terfokus pada daerah perkotaan terutama daerah Jawa. Daerah perkotaan dan sebagian besar Pulau Jawa mengalami kemajuan yang pesat baik dalam pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Sementara di daerah 3T masih tertinggal jauh. Roda perekonomian tidak meningkat secara signifikan di daerah-daerah 3T tersebut. Kalian mungkin pernah melihat di berita atau media sosial bagaimana pelajar di daerah 3T harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai yang cukup deras, melewati jembatan gantung yang hampir putus, atau berjalan kaki melewati hutan yang jaraknya cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Atau mungkinkah juga di antara kalian ada yang mengalaminya secara langsung?



Gambar 5.8 Potret pembangunan infrastruktur jalan di daerah 3T.

Sumber: koran.tempo.co

Melihat ketimpangan seperti itu, fokus RAN pembangunan berkelanjutan 2020-2014 salah satunya diarahkan pada peningkatan sarana konektivitas di daerah 3T seperti pembangunan jalan dan jembatan. Sama dengan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan dan bandara menjadi agenda pemerintah di daerah 3T. Tujuannya agar warga sekitar dapat terhubung lebih cepat dengan wilayah luar. Hasil bumi dan produk kerajinan yang ada di daerah 3T semakin mudah didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Dengan demikian, para petani, nelayan atau pengrajin mendapatkan harga maksimal dari usaha mereka.

Selain sarana transportasi, akses terhadap kesehatan dan pelayanan medis yang berkualitas juga diharapkan dapat dijangkau secara mudah oleh mereka yang tinggal di daerah 3T. Di media massa, kita mungkin pernah membaca atau menonton bagaimana pasien di daerah terpencil harus ditandu menggunakan sarung dan bambu oleh keluarga dan warga sekitar untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak. Terkadang juga terdapat kasus pasien meninggal di perjalanan karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sangat membantu masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Tidak hanya akses terhadap pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah dan ketersediaan guru berkualitas juga sangat dibutuhkan di daerah 3T. Hal ini supaya para pelajar di daerah tersebut dapat merasakan apa yang telah lama dirasakan oleh pelajar lain di daerah-daerah yang telah jauh berkembang. Untuk hal ini pemerintah telah menyediakan beasiswa khusus untuk pelajar atau mahasiswa yang tinggal di daerah 3T. Contohnya, beasiswa KIP Kuliah dan LPDP yang sempat kita bahas sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih untuk membukakan kesempatan bagi para pelajar di daerah 3T untuk menggapai cita-cita. Harapannya, dengan cara seperti ini lambat laun ketimpangan ekonomi dan kualitas pendidikan di Indonesia semakin berkurang.

2. Model Pembangunan dari Bawah ke Atas

Dalam UU No. 59 Tahun 2017 juga dikatakan bahwa pelaksana tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pemerintah, yaitu kementerian dan pemerintah daerah serta ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Disebutkan juga bahwa masyarakat turut menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan berkelanjutan itu. Hal ini berbeda dengan pembangunan sebelumnya, di mana masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, sehingga mereka tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan bentuk pembangunan seperti apa yang sesungguhnya mereka butuhkan.

Melalui organisasi atau komunitas yang mereka bentuk, masyarakat dapat terlibat aktif merumuskan pembangunan bersama dengan pemerintah, akademisi dan lembaga lain yang terlibat. Mengapa keterlibatan masyarakat penting? Tentu saja agar pembangunan yang menelan banyak biaya, tenaga dan waktu bisa tepat sasaran. Kondisi masyarakat di berbagai daerah sangat beragam. Otomatis kebutuhannya juga beragam, prioritas kebutuhannya juga tidak sama. Dengan demikian, agenda pembangunan berkelanjutannya juga sangat beragam dan fleksibel bentuknya, menyesuaikan di mana dan siapa yang akan menerima manfaatnya. Dalam hal ini keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pelaku usaha, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya diperlukan untuk melihat apakah kebutuhan masyarakat yang dimaksud sudah sesuai atau belum.

Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dari bawah ke atas maupun sebaliknya menjadi sangat nyata dan bermanfaat, apalagi jika dilakukan dengan semangat gotong royong dan persatuan.

Setiap tahun, pemerintah desa akan menganggarkan kebutuhan pembangunan ke kementerian. Setelah disetujui, pemerintah

desa dengan melibatkan masyarakat sekitar dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berdaya untuk memajukan desa mereka dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Meskipun target pembangunan berkelanjutan disepakati pada tahun 2030 nanti, namun Indonesia juga telah memiliki target Indonesia Emas pada tahun 2045. Dengan demikian, agenda pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan sebagai sarana menuju Indonesia Emas.

Setelah membaca uraian materi-materi di atas, berikut beberapa sikap atau perilaku yang dapat kamu amalkan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan:

A. Menghindari Pola Konsumsi yang Berlebihan

Usia remaja cukup identik dengan gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif tersebut dekat kaitannya dengan *food* (makanan), *fashion* (pakaian) dan *fun* (hiburan). Sebagai contoh, kebiasaan tidak menghabiskan makanan yang dibeli. Mungkin sempat terbersit di pikiran kalian bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan, mengingat makanan tersebut dibeli dengan uang pribadi kalian. Pemikiran yang demikian tentu adalah pemikiran yang kurang baik dan bijak. Bayangkan jika ternyata bukan hanya kalian yang melakukan hal tersebut. Tentu akan menghasilkan sampah yang sangat banyak. Faktanya, sampah sisa makanan per tahun di Indonesia mencapai 1,3 juta ton, yang berarti setiap tahunnya setiap orang mampu menghasilkan sampah makanan sisa kurang lebih sebanyak 300 kg. Selain tentang sampah terdapat juga tanggung jawab moral dalam diri kita sebagai manusia di mana terdapat berjuta-juta orang di luar sana yang menderita kelaparan karena tidak mampu membeli makanan. Jadi, mari memulai gerakan dari diri sendiri lebih dahulu untuk tidak membuang-buang makanan.

Selain sampah makanan, sampah pakaian juga menjadi satu hal yang paling disoroti. Biasanya masa remaja juga identik dengan mengoleksi

berbagai macam model pakaian. Pergantian model pakaian yang sangat cepat juga menuntut sebagian remaja mengikuti tren yang ada. Satu demi satu pakaian dibeli dan secara tidak sadar ternyata sudah memenuhi lemari, bahkan sebagian sudah tidak muat dan harus disortir. Pernah tidak kalian berpikir apakah yang akan kalian lakukan terhadap koleksi pakaian yang sudah tidak lagi digunakan itu? Seandainya kalian membuangnya di tempat sampah, apakah kalian tahu limbah pakaianmu berakhir di mana? Apa dampaknya terhadap lingkungan? Limbah pakaian berdampak pada polusi air, tanah dan gas emisi rumah kaca.

Hal kecil yang dapat kita gunakan untuk memperpanjang nilai manfaat pakaian dan mengurangi masalah lingkungan adalah menyumbangkan pakaian layak pakai kepada orang yang membutuhkan. Namun, perlu diingat bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Kita perlu menyadari bahwa membeli pakaian harus disertai dengan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menahan diri dan membeli pakaian sesuai dengan keperluan saja.

B. Mengikuti Gerakan Peduli Lingkungan



Gambar 5.9 Gerakan peduli lingkungan.

Kita semakin mudah menemukan remaja yang menginisiasi dan terlibat aktif dalam gerakan peduli lingkungan. Mereka didorong oleh kesadaran bahwa lingkungan yang semakin rusak dan tercemar akan mengancam generasi mereka dan generasi selanjutnya. Greta Thunberg dari Swedia,

di usianya yang masih 17 tahun mampu menggerakkan anak muda lain di seluruh dunia untuk turut serta peduli terhadap lingkungan. Greta menggunakan jiwa kritisnya sebagai anak muda untuk mempersoalkan isu pencemaran lingkungan. Bahkan di forum internasional, dia tidak segan mengkritik para pemimpin dunia yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi dan menyampingkan kondisi lingkungan. Ada satu slogan menyentuh dari Greta untuk para pemerintah dan korporasi, yakni “Kamu mengatakan bahwa kamu mencintai kami, anak-anakmu, tetapi kamu merusak masa depan kami”. Masa depan artinya bumi yang kemungkinan besar tidak lagi layak dihuni beberapa puluh tahun ke depan. Apalagi jika gerakan peduli lingkungan tidak dimulai dari sekarang.

Tidak hanya di luar negeri saja, terdapat dua orang kakak beradik di Bali bernama Melati dan Isabel Wijsen yang juga peduli dengan lingkungan. Mereka menginisiasi gerakan *Bye Bye Plastic Bags*. Mereka mendesak Pemerintah Bali supaya melarang penggunaan kantong plastik sejak tahun 2013. Perjuangan mereka selama lima tahun akhirnya dikabulkan oleh Pemerintah Bali. Berkat petisi dan aksi mogok makan yang mereka lakukan, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengeluarkan peraturan larangan penggunaan kantong plastik pada tahun 2018.

Coba kalian cari tahu, apakah ada anak-anak muda di daerahmu yang telah menginisiasi gerakan peduli lingkungan. Siapa tahu kalian tertarik untuk bergabung. Jika kalian tidak menemukannya, berarti kalian bisa mulai menginisiasi gerakan peduli lingkungan bersama teman-temanmu. Bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan rumah dan sekolah masing-masing. Bisa juga melakukan aksi bersih-bersih pinggir sungai atau pinggir pantai di daerah tempat tinggalmu.

C. Menyadari Secara Penuh Bahwa Pendidikan yang sedang Ditempuh adalah Bagian Penting dari Pembangunan Berkelanjutan

Pelajar adalah aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Semakin terpelajar para pemuda di suatu negara, maka semakin maju

negara tersebut. Oleh karena itu, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator maju tidaknya masyarakat.

Pemuda terpelajar diyakini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Jika kalian tinggal di daerah 3T, perjuanganmu untuk menyelesaikan studi sampai SMA/SMK/MA/MAK akan membantu daerahmu untuk dapat berkembang. Apa lagi jika kalian memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan ilmu yang kalian miliki, kalian mampu melihat potensi-potensi terpendam yang ada di daerah kalian. Kalian juga bisa menggerakkan anak muda di daerahmu untuk berwirausaha, dan membangun kemandirian ekonomi di desa. Ada banyak hal yang dapat kalian lakukan dengan ilmu yang kalian miliki.

Prinsip di atas juga berlaku untuk negara tercinta. Dengan semangat menempuh pendidikan yang tinggi, akan membantu Indonesia segera keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain melalui inovasi dan kerja-kerja cerdas anak muda.



Refleksi

Silahkan isi kolom jawaban pada tabel berikut sebagai bentuk kegiatan refleksi yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pancasila

No.	Pernyataan Refleksi	Jawaban
1.	Setelah mempelajari bab di atas, bisakah kalian menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan pembanguna berkelanjutan?	

No.	Pernyataan Refleksi	Jawaban
2.	Sampah plastik menjadi tantangan dalam pembangunan dibidang lingkungan hidup. Menurut kalian, mengapa kita sebagai generasi muda harus mengurangi penggunaan plastik? Jelaskan!	
3.	Terdapat tiga misi utama yang ingin diwujudkan dalam pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>). Jelaskan masing-masing secara singkat!	
4.	Masyarakat adat Kajang atau suku Kajang di Sulawesi Selatan sangat menjaga lingkungannya. Sebagai contoh mereka tidak melakukan eksploitasi alam. Menurut kalian, masih adakah contoh lain masyarakat adat yang memegang teguh adat untuk menjaga lingkungannya? Jika ada, jelaskan!	
5.	Setelah membaca cerita singkat novel dengan judul "Dunia Anna" apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kamu?	
6.	Sebagai generasi penerus, kalian dituntut untuk bisa menjaga alam ini. Mengapa pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting? Jelaskan!	

GLOSARIUM

Abstrak	: Tidak berwujud; tidak berbentuk
Akomodir	: Menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan
Anarki	: Tidak adanya pemerintahan, undang-undang atau ketertiban; kekacauan dalam suatu negara
Aspirasi	: Harapan dan tujuan
Barometer	: Tolok ukur, ukuran (baik, buruk, dan sebagainya)
Caleg	: Calon Legislatif (seseorang yang dicalonkan untuk menjadi wakil rakyat)
Diagram	: Gambaran untuk menerangkan sesuatu
Diktator	: Kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak, biasanya dilakukan dengan kekerasan
Dinamika	: Gerak/tenaga yang menggerakkan/sesuatu yang membuat gerak
Diskriminasi	: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, agama, golongan, suku, ekonomi, dan sebagainya)
Entitas	: Satuan yang berwujud; wujud
Etika	: Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
Fair Play	: Bersikap adil
Falsafah	: Anggapan, gagasan, dan sikap batin paling dasar yang dimiliki seseorang; pandangan hidup
Fenomena	: Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah
Filsafat	: Pengetahuan mengenai segala yang ada, sebab, asal, dan hukumannya
Formal	: Sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku
Fundamental	: Bersifat dasar (pokok); mendasar
Global	: Secara umum dan keseluruhan
Hak	: Sesuatu yang seharusnya dimiliki orang

Hakikat	: Inti sari/dasar
Identitas	: Ciri/Keadaan khusus seseorang
Ilustrasi	: Gambar (foto/lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya
Implementasi	: Pelaksanaan; penerapan
Independen	: Tidak terikat pihak lain
Individualistis	: Individualistis adalah orang-orang yang yakin akan diri sendiri dan sangat mandiri sehingga berpikiran orang lain tidak berpengaruh terhadap kehidupannya.
Instrinsik	: Terkandung di dalamnya
Interaksi	: Hal saling melakukan aksi; berhubungan
Intimidasi	: Tindakan menakut-nakuti, gertakan ancaman
Istilah	: Arti
Kesadaran Hukum	: Kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku
Komite	: Sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan)
Komprehensif	: Mampu menangkap (menerima dengan baik); mempunyai wawasan yang luas
Komunal	: Bersangkutan dengan komune; milik rakyat umum
Komunitas	: Kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban
Konkrit	: Nyata; penting
Konsekuensi	: Akibat dari suatu perbuatan
Konstitusi	: Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
Kontradiktif	: Bertentangan, berlawanan
Konversi	: Perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain

Koridor	: Jalan penghubung
Lansia	: Lanjut usia
Legislatif	: Dewan yang berwenang membuat undang-undang
Liberalisme	: Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga
Majemuk	: Beberapa bagian yang berbeda tetapi adalah satu kesatuan
Manifestasi	: Perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat
Mayoritas	: Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibanding dengan jumlah lain yang tidak memperlihatkan ciri itu
Mentor	: Pembimbing; pengasuh
Minoritas	: Golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat
Moral	: Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila
Narasi	: Pengisahan suatu cerita atau kejadian
Norma	: Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu
Orator	: Orang yang ahli berpidato
Pedoman	: Hal (pokok) yg menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu
Pengkajian	: Proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan (pelajaran yang mendalam); penelaahan
Philosophische Grondslag	: (fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan "Indonesia merdeka yang kekal dan abadi"
Pluralisme	: Keadaan masyarakat yang majemuk

Pragmatisme	: Pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis
Praktis	: Berdasarkan praktik
Pranata	: Sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku
Primordial	: Bentuk atau tingkatan paling awal; paling dasar
Prinsip	: Asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)
Proporsional	: Sesuai dengan proporsi; seimbang
Refleksi	: Gerakan; cerminan; gambaran
Rekapitulasi	: Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir perhitungan
Religius	: Bersifat keagamaan
Resume	: Ikhtisar; ringkasan
Sistem	: Perangkat/unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas
Solidaritas	: Sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); perasaan setia kawan
Strategi	: Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus
Substansi	: Isi, pokok, inti
Substantif	: Kecil, tak terlihat, atau bagian kecil dari suatu hal yang terdefinisi
Tirani	: Kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang
Toleransi	: Menahan diri/sikap saling menghormati
Weltanschauung	: Pandangan umum yang menyangkut hakikat, nilai, arti dan tujuan dunia dan hidup manusia
Yuridis	: Secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Azis, Iwan J., dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2020. *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP. Tidak diterbitkan.
- Budimanta, Arif. 2019. *Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- . 2020. *Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Driyarkara, Nicolaus. 1985. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gaarder, Jostein. 2013. *Dunia Anna* (terj.). Jakarta: Mizan.
- Hatta, Mohammad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- . 1978. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Jakarta Mutiara s.a.
- Latif, Yudi. 2018. *Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.
- . 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto, Budiono (ed), 1994. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE.

Gambar dan Artikel Internet

- Ade Indra Kesuma. 2019. *Kisah Guru Muda yang Siap Mengukir Cinta di Tanah Papua*. <https://www.suara.com/lifestyle/2019/09/05/083412/kisah-guru-muda-yang-siap-mengukir-cinta-di-tanah-papua?page=all> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 14.20 WIB)
- Arsip Nasional Indonesia. 2021. *Pameran Virtual ANRI*. <https://anri.go.id/publikasi/pameran-virtual?page=6> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 09.25 WIB)

- Byebyeplasticbags.org.2021. *Bye=bye plastic bags*. <http://www.byebyeplasticbags.org/team> (diakses pada 1 April 2021 pukul 19.00 WIB)
- Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi (BPPT). 2021. *Inovasi Teknologi Sebagai Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi*. <https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/4279-inovasi-teknologi-sebagai-upaya-strategis-pemulihan-ekonomi> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 10.07 WIB)
- Bappeda Jakarta. 2021. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Tahun 2021*. <https://bappeda.jakarta.go.id/p/HeadLine/222/musyawarah-perencanaan-pembangunan-musrenbang-nasional-tahun-2021> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 23.45)
- Beritalingkungan.com. *Pesan Lestari dari Negeri Ammatoa*. <https://beritalingkungan.com/2009/09/25/pesan-lestari-dari-negeri-ammatoa/> (diakses pada 1 April 2021 pukul 19.00 WIB)
- Detikfinance.com. 2021. *100 Koperasi Besar Bukan Akumulasi Aset Rp 66,6 Triliun*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5407903/100-koperasi-besar-bukan-akumulasi-aset-rp-666-triliun> (diakses pada 1 April 2021 pukul 19.00 WIB)
- Fatimah Rahmawati. 2020. *Marsialapari, Tradisi Gotong Royong yang Mengakar Kuat di Masyarakat Mandailing*. <https://www.merdeka.com/sumut/marsialapari-tradisi-gotongroyong-yang-mengakar-kuat-di-masyarakat-mandailing.html> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 21.36 WIB)
- Gaekon. 2020. *Wajib Diketahui, Inilah 5 Makna Lambang Pancasila*. <https://gaekon.com/wajib-diketahui-inilah-5-makna-lambang-pancasila/> (diakses pada 28 Juni 2021 pukul 08.30 WIB)
- Inibaru.id. 2020. *Tradisi Marakka' Bola di Sulawesi Selatan*. <https://inibaru.id/tradisinesia/mappalette-bola-tradisi-pindah-rumah-ala-sukubugis-yang-unik> (diakses pada 25 Maret 2021 pukul 19.00 WIB)
- Ivan Mardiansyah. 2019. *Di balik foto viral biksu yang membantu seorang pria berwudu*. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47156707> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 13.19 WIB)
- Jaja Suharno. 2017. *Tri Kerukunan Umat Beragama*. <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/42737-tri-kerukunan-umat-beragama> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 13.50 WIB)

- Jihaan Khoirunnisaa. 2021. *100 Koperasi Besar Bukukan Akumulasi Aset Rp 66,6 Triliun*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5407903/100-koperasi-besar-bukukan-akumulasi-aset-rp-666-triliun> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 22.39 WIB)
- Kementrian PPN/Bapenas. 2019. *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kementrian PPN/Bapenas.
- Kementrian Kominfo. 2020. *Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika 2020-2024*. Jakarta: Kementrian Kominfo
- MC Kabupaten Kulonprogo. 2019. *Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo Resmikan ToMira (Tokyo Milik Rakyat) ke-17*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/358439/wakil-bupati-kulon-progo-sutedjo-resmikan-tomira-toko-milik-rakyat-ke-17?video=> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 21.53 WIB)
- Melalusa Susthira K. 2021. *Marakka Bola': Tradisi Unik Bergotong Royong Memindahkan Rumah Seutuhnya*. <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=marakka-bola-tradisi-unik-bergotong-royong-memindahkan-rumah-seutuhnya> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 21.42 WIB)
- Nur Fitriatus Shalihah. 2020. *92 Tahun Sejarah dan Isi Teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/28/060000965/92-tahun-sejarah-dan-isi-teks-sumpah-pemuda-28-oktober-1928> (diakses pada 22 Mei 2021 Pukul 11.10 WIB)
- Polres Karangasem. 2017. *Ngaturang Ngayah, Tradisi Yang Harus Tetap Ada Di Bali*. <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/87744> (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 21.30 WIB)
- Pengadaan.web.id. 2019. *Ilustrasi Musrenbang kelurahan*. <https://www.pengadaan.web.id/2019/11/musyawah-perencanaan-pembangunan-musrenbang.html> (diakses pada 23 Maret 2021 pukul 19.00 WIB)
- PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 2021. *Tentang Kami*. <https://cargo.kai.id/site/about> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 13.40 WIB)
- Republika.com. 2018. *DPR Selenggarakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang*. <https://www.republika.co.id/berita/p53h17428/dpr->

- selenggarakan-rapat-paripurna-pembukaan-masa-sidang (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 20.56 WIB)
- Republika.com. 2021. *Perpres Pencegahan Terorisme Terbit*. <https://www.republika.id/posts/13420/perpres-pencegahan-terorisme-terbit> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 11.37 WIB)
- Riaubook.com. 2016. *Dinas Pendidikan Dumai Anggarkan Pembangunan Sekolah Dasar Sebesar Rp 4,2 Miliar*. <http://www.riabook.com/berita/16393/dinas-pendidikan-dumai-anggarkan-pembangunan-sekolah-dasar-sebesar-rp-42-miliar> (23 Maret 2021 pukul 19.00 WIB)
- Samsudi M, Suwarno B. 2021. *Reboisasi 6 Ribu Hektar, Upaya Perhutani Bondowoso Cegah Banjir*. https://rri.co.id/surabaya/sosial/983281/reboisasi-6-ribu-hektar-upaya-perhutani-bondowoso-cegah-banjir?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 13.20 WIB)
- Sapto Andika C, Budi R. 2017. *Ini Penyebab Meningkatnya Ketimpangan di Indonesia*. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/24/oltyjv415-ini-penyebab-meningkatnya-ketimpangan-di-indonesia> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 13.53 WIB)
- Satria. 2020. *GeNose UGM Dapatkan Izin Edar dan Siap Dipasarkan*. https://ugm.ac.id/id/berita/20551-genose-ugm-dapatkan-izin-edar-dan-siap-dipasarkan?fb_comment_id=4762938713776274_4771450106258468 (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 10.39 WIB)
- Suryana W, Amanda G. 2019. *Pelatihan Kerja Diharap Jadi Modal Pengembangan Desa*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/desabangkit/19/02/04/pmd1m423-pelatihan-kerja-diharap-jadi-modal-pengembangan-des> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 13.10 WIB)
- Tempo.co. 2018. *Pasar Tradisional Akan Dilengkapi Bioskop Rakyat*. <https://koran.tempo.co/read/metro/436843/pasar-tradisional-akan-dilengkapi-bioskop-rakyat> (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 12.50 WIB)
- Tempo.co. 2018. *Pengembangan Desa Tertinggal Terhambat Infrastruktur*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/438068/>

pengembangan-desa-tertinggal-terhambatinfrastruktur (diakses pada 23 Juni 2021 pukul 14.17 WIB)

Umbelen.com. *Tradisi Ngayah di Bali*. <https://umbelen.com/> (diakses pada 23 Maret 2021 pukul 19.00 WIB)

Un.org. tanpa tahun. *United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992*. <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1> (diakses pada 1 April 2021 pukul 19.00 WIB)

Unfoundation.org. tanpa tahun. *Sustaibable Development Goals*. <https://unfoundation.org/what-we-do/issues/sustainable-development-goals> (diakses pada 1 April 2021 pukul 19.00 WIB)

PROFIL PELAKU PENERBITAN

Penulis

Nama Lengkap : Dr. Hasse Jubba, M.A.
Email : praktisi_99@yahoo.com
Instansi : Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Alamat Instansi : Kampus Terpadu UMY, Jl.
Brawijaya, Geblagan, Tamantirto,
Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
Bidang Keahlian : Islam & Politik



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1, IAIN Alauddin Makassar, 2001
2. S2, Center for Religious & Cross-cultural Studies UGM, 2005
3. S3, Agama & Lintas Budaya, UGM, 2012

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual di Indonesia, 2019
2. Reorientasi Pemikiran Pendidikan Islam, 2020

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. The contestation between conservative and moderate Muslims in promoting Islamic moderatism in Indonesia, 2022.
2. Reorienting Moral Education for Millennial Muslims: The Changing Role of Islamic Boarding Schools in Indonesia, 2021.
3. Dominasi Internet di Ruang Publik: Studi terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 di Indonesia, 2020.

■ Informasi Lain dari Penulis:

<https://scholar.google.com/YiPJZ6oAAAAJ>

Penulis

Nama Lengkap : Dr. Yuyus Kardiman, M.Pd.
Email : yuyuskardiman.ppkunj@gmail.com; yuyus-kardiman@unj.ac.id
Instansi : Universitas Negeri Jakarta



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Dosen di Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Kepala Laboratorium PPKn Jurusan Ilmu Sosial Politik - Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Jakarta 2009–2014
3. Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Pancasila MKWU UNJ Tahun 2020–2025
4. Tim Pengembang Wakil Rektor IV, Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta (2022–2024)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S-1, Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan – Universitas Pendidikan Indonesia/UPI, lulus tahun 1999.
2. S-2, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan/PKN – Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2008
3. S-3, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan/PKN – Sekolah Pasca Sarjana – Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2021.

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Kewarganegaraan, untuk kelas I s.d VI SD, penerbit Acarya Media Utama.
2. Spirit Kewarganegaraan, pelajaran PKN untuk kelas VII, VIII & IX SMP, penerbit Sinergi
3. Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/MA berbasis Kurikulum 2013, Penerbit Erlangga.

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Konten Sebagai Konsep Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Pada Tingkat SMP/Sederajat Di Era Digital. Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2021).
2. Interactive Mobile Technologies on Civic Education Learning in Higher Education. International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijIM) – 2021. ijim - Scoopus
3. Pancasila and Civilized Society. Proceeding terindek Thomson, 2019. ACEC. UPI
4. Religiosity in Pancasila; Pluralistic Perspective. Proseding terindek scopus, 2018. ACEC.UPI

Penulis

Nama Lengkap : Prayogo, S.Kom
Email : prayogo@karakterpancasila.id
Instansi : Yayasan Karakter Pancasila

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Tahun 2017-2019, Kontributor Riset di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI).
2. Tahun 2020-sekarang, Manajer Riset dan Program di Yayasan Karakter Pancasila (YKP).

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Strata Satu (S1) Universitas Nusa Mandiri, Jurusan Manajemen Informatika. 2014
2. Strata Dua (S2) IPB University, Peminatan Penyuluhan Pembangunan (PPN). 2020.

■ Kontribusi pada jurnal/prosiding/buku (10 Tahun Terakhir):

1. Jurnal Penelitian Politik LIPI, Volume 14 No. 2 Desember 2017
2. Jurnal Penelitian Politik LIPI, Volume 15 No. 2 Desember 2018
3. Buku. Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019. Tahun 2019.
4. Buku. Peta Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019: Survei Pandangan Ahli. Tahun 2019.
5. *Policy Paper* Pendekatan Keamanan Insani dalam Mewujudkan Solidaritas dan Kerja Sama ASEAN di Tengah Pandemi Covid-19. Tahun 2020.

■ Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Panduan Fasilitator Pelatihan Karakter Pancasila, Yayasan Karakter Pancasila. 2020
2. BPJS Ketenagakerjaan Berintegritas, Yayasan Karakter Pancasila. 2020
3. Pancasila Pascapembubaran FPI, Republika 2021.
4. Buku Saku Pemberdayaan PKK, Kewirausahaan Sosial, dan Kesejahteraan, IPB Press. 2022.

Penelaah

Nama Lengkap : Muhammad Sabri
Email : mohdsabriar@yahoo.co.id
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Alamat Instansi : Jl. Veteran III No.2, Gambir, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta
Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Direktur Pengkajian Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Ketua Program Studi Dirasah Islamiyah (Islamic Studies), Pascasarjana UIN Alauddin

■ Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 IAIN Alauddin Ujungpandang, Lulus 1991
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 1997
3. S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus 2008

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. 1. Mengurai Kesenyapan Bahasa Mistik: Dari Filsafat Analitik Ke Epistemologi Hudhuri. 2017
2. Islam, Keindonesiaan, dan Postmodernitas: Gagasan Pembaruan Pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam Gelombang Kedua. 2017

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought)". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. 2022
2. "Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*. 2021
3. "Menemukan Kembali Spirit Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Timbangan Nalar Philosophia Perennis". *Jurnal Pembeduan Pancasila*. 2021.

■ Halaman Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=f479_wQAAAAJ&hl=en

Penelaah

Nama Lengkap : F.X. Adji Samekto
Email : samektoadjifx@gmail.com
Instansi : Universitas Diponegoro
Alamat Instansi : Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Filsafat Hukum, Teori Hukum



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro, Lulus Tahun 1986
2. Magister Humaniora, Universitas Padjajaran, Lulus Tahun 1995
3. Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Lulus Tahun 2004

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tantangan Indonesia dalam Taman Sari Dunia: Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Tahun 2021
2. Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme. Tahun 2020
3. Negara dalam dimensi hukum internasional. Tahun 2018

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Legal Certainty of Plea Bargaining In Addressing Tax Crimes In Indonesia". *International Journal of Global Community*. 2022.
2. "Policy Complexity of Agrarian Reform in Coastal Regions: An Effort to Realise Social Welfare". *Journal of Positive School Psychology*. 2022
3. "A Psychological view of Corporate Crimes of Legislation". *Journal of Positive School Psychology*. 2022
4. "Criminal Liability of Holding Company in Environmental Crime in Indonesia". *International Journal of Environmental Science* 6. 2021
5. Barriers to the Enforcement of Environmental Law: An Effect of Free Market Domination and Regional Autonomy in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*. 2021

■ Halaman Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=f479_wQAAAAJ&hl=en

Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

Email : d_sundawa@yahoo.com

Instansi : UPI

Alamat Instansi : Bandung

Bidang Keahlian : Pembelajaran PKn

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Koordinator PLPG Rayon 10 (2007-2017)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2016-2019)
3. Ketua Prodi PIPS (2016-2021)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 IKIP Bandung - PMPKN (1981-1986)
2. S2 IKIP Bandung - IPS (1995-1997)
3. S3 UPI - PKn (2008-2011)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Materi dan Pembelajaran PKn (2017)
2. Pembelajaran IPS (2017)
3. Evaluasi Pembelajaran PPKn (2021)
4. Membangun Kelas PPKn sebagai Laboratorium Pendidikan Demokrasi (2022)
5. Buku Pendidikan Lalu Lintas untuk Siswa SMA (2018)
6. Pendidikan Multi Budaya (2018)
7. Bumiku Indonesia (Bunga Rampai Kearifan Lokal) (2021)
8. Rumah Kita Dosen Indonesia (2020)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pelestarian Nilai-nilai Civic Culture Dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang (2016)
2. Penerapan Model VCT (*Value Clarification Technique*) dengan menggunakan media cerita daerah dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan Karakter peserta didik (2016)
3. *The Implementation of Character Education on Civics Education Subject at Junior High School of UPI* (2018)
4. Membangun Kesadaran Warganegara Milenial Dalam Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila (2019)
5. *Project Citizen Digital: Education in The Era Of Industrial Revolution 4.0* (2020)
6. Pendidikan Nilai dan Moral Dalam Sistem Kurikulum Pendidikan Di Aceh (2021)
7. Strengthening civic education through project citizen as an incubator for democracy education (2022)

Penelaah

Nama Lengkap : Prof.Dr.Dwi Purwoko,MSi
Email : d_purwoko2003@yahoo.com
Instansi : Puslit Masyarakat dan Budaya BRIN
Alamat Instansi : Jln.Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Agama dan Tradisi Keagamaan
(Agama dan Kemasyarakatan)



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Dosen Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila
2. Dosen Pasca Sarjana Univeristas Pramita Indonesia

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

Doktoral dari Studi Penyuluhan Pembangunan IPB

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

-

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Model Internalisasi Nilai Nilai Moderasi Beragama Pada Peserta Didik di Semarang
2. Model Kurikulum Kontektual dan Kemampuan Literasi di Papua)

Ilustrator

Nama Lengkap : Mokhammad Khotibul Umam, S.Pd
Email : umam.lakalaka@gmail.com
Instansi : lakalaka creative studio
Alamat Instansi : Harapan Jaya Bekasi
Bidang Keahlian : Ilustrator, Pengajar Gambar

■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Ilustrator, storyboard artist
2. Guru Gambar di SMAI Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. SD Negeri Pepedan 1 Tegal 1995
2. SMP dan Pondok Pesantren Annuriyyah BumiAyu 1998
3. SMKN 2 Adiwerna 2001
4. Universitas Negeri Jakarta Jurusan Pendidikan SeniRupa& Desain 2008

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

-

Editor

Nama Lengkap : Hendrikus Genggor, S.IP, M.Pd
Email : -
Instansi : Pemda KAB. Manggarai Barat
Alamat Instansi : Manggarai Barat
Bidang Keahlian : Editing



■ Riwayat Pekerjaan (10 tahun terakhir):

1. Penerbit Erlangga, Editor, 2000-2010
2. Pemda Kab. Manggarai Barat, 2010-sekarang

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fisipol/Manajemen Publik, 1999
2. S2, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Magister Pendidikan, 2008

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Editor, Sosiologi SMA - Kunmaryati dan Juju Suryawati, Esis-Erlangga
2. Editor, IPS SD - Tyas utami, Esis-Erlangga
3. Editor, PKN SD - Dyah sriwilujeng, Esis-Erlangga
4. Editor, Ekonomi SMA - Alam S, Esis-Erlangga
5. Editor, Seni Musik SMP dan SMA - Matusali, Esis-Erlangga
6. Editor, Pakem: Panduan Praktis Mengajarkan IPS dengan Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan - Nani Rosdijati, Esis-Erlangga
7. Penulis, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Manggarai - Hendrikus Genggor dan Fransiskus Ramli, Anugrah Ruteng
8. Penulis, Pendidikan Konservasi Ling

■ Karya Tulis Lain (10 Tahun Terakhir):

1. Potret Pendidikan di NTT, Flores Pos
2. Transformasi Birokrasi Bagi Otonomi Daerah, SuryaTimor
3. UN: Mengukur Mutu Pendidikan di NTT, Flores Pos
4. Guru Kurang "Seksi" Bagi Pemda, Flores Pos
5. MARAH ORANG LAIN ATAU (SEBAIKNYA) MARAH DIRI SENDIRI?, Florespost.co

Desainer

Nama Lengkap : Imee Amiatun
Email : imeealma@gmail.com
Bidang Keahlian : Layout/Setting

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 tahun terakhir):

1. Freelance layout s/d sekarang
2. Layouter PT Sarana Panca Karya Nusa (2004–2009, 2015)
3. Layouter PT Grafindo Media Pratama (2017, 2019)

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. Manajemen Informatika - D3 "STMIK AMIKBANDUNG" (2000)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Panduan Guru Matematika Kelas XII, Pusbuk BSKAP Kemdikbud (2021)
2. Buku Siswa dan Buku Guru Kimia Kelas XII (lisensi), Pusbuk BSKAP Kemdikbud (2021)
3. Buku Panduan Guru Matematika Kelas IV, Pusbuk BSKAP Kemdikbud (2020)
4. Kumpulan Soal dan Pembahasan UN Fisika SMA, PT Bhuana Ilmu Populer (2021)
6. Buku Teks Bahasa Arab Kelas I-IV SD, PT Grafindo Media Pratama (2019)
7. Buku Teks IPS Kelas VII & IX, As-Syifa Learning Center (2019)
8. Ringkasan Materi dan Latihan Soal Matematika Kelas IX SMP/MTs, Bhuana Ilmu Populer (2019)
9. Buku Teks IPS Kelas VII, PT Grafindo Media Pratama (2018)